

**PENGARUH SEKTOR UNGGULAN DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP KETERSERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Oleh
RATNA DWI ASTUTIK
NIM: G71219051



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN

Saya, Ratna Dwi Astutik, G7121901, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menuliskan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 16 Januari 2023



Ratna Dwi Astutik
NIM. G71219051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surabaya, 16 Januari 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Hakim', written in a cursive style.

Dr. H. Abdul Hakim, MEI

NIP. 197008042005011003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH SEKTOR UNGGULAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KETERSERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2021

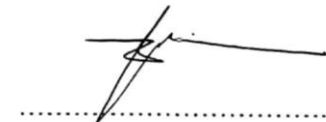
Oleh
Ratna Dwi Astutik
NIM: G71219051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.
NIP. 19700804200511003
(Penguji 1)
2. Ana Toni Roby Candra Yudha, S.E.I., M.S.E.I.
NIP. 201603311
(Penguji 2)
3. Abdullah Kaffabih, S.E.I., M.S.E.I.
NIP. 199108072019031006
(Penguji 3)
4. Debby Nindya Istiandari, M.E.
NIP. 199512142022032002
(Penguji 4)

Tanda Tangan


.....
.....
.....
.....

Surabaya, 01 Februari 2023



Dr. Sarajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ratna Dwi Astutik
NIM : G71219051
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail address : ratnaswi29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENGARUH SEKTOR UNGGULAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
KETERSERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2021**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2023

Penulis

(Ratna Dwi Astutik)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pengaruh Sektor Unggulan dan Upah Minimum terhadap Keterserapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021” ini merupakan hasil penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari sektor unggulan dan upah minimum terhadap ketersediaan tenaga pekerja di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Metode penelitian yang dipergunakan ialah analisis *location quotient* (LQ) untuk mengetahui sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur, analisis Regresi Data Panel untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel serta analisis elastisitas penyerapan tenaga pekerja untuk mengetahui nilai elastisitas ketersediaan tenaga kerja dengan jenis data sekunder yang didapat dari BPS dan dinas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Data-data yang didapat kemudian diolah dengan *software Eviews 12*.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui sektor unggulan Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 ialah sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi makan-minum serta sektor informasi. Hasil penelitian secara parsial memperlihatkan variabel sektor unggulan mempunyai pengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap ketersediaan tenaga pekerja Jawa Timur dengan hasil T hitung sebesar $-0,206059$. Serta variabel upah minimum berpengaruh positif serta signifikan terhadap ketersediaan tenaga pekerja dengan T hitung sebesar $6,943340$. Sedangkan, hasil analisis elastisitas penyerapan tenaga pekerja diketahui jika sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, sektor penyediaan akomodasi makan-minum serta sektor informasi bersifat elastis menyerap tenaga pekerja Provinsi Jawa Timur dengan nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja tinggi di sektor pengadaan air. Sementara itu, sektor perdagangan memiliki sifat inelastis pada penyerapan tenaga pekerja Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa terus memajukan sektor unggulan yang dimiliki agar sektor unggulan tersebut mampu meningkatkan sumbangsinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu mendorong peningkatan sektor ekonomi yang lainnya di mana nantinya mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal.

Kata Kunci: Sektor Unggulan, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Pekerja

ABSTRACT

The thesis entitled "The Influence of Leading Sectors and Minimum Wage on Labor Absorption in East Java Province in 2017-2021" is the result of a descriptive quantitative study that aims to see the effect of leading sectors and minimum wages on employment in East Java Province from 2017 until 2021.

The research method used is analysis location quotient (LQ) to determine the leading sector in East Java Province, Panel Data Regression analysis to determine the effect of each variable and analysis of the elasticity of employment absorption to determine the value of the elasticity of employment with secondary data types obtained from BPS and the Department of Manpower of the Province of Java East. The data obtained is then processed with software Eviews 12.

From the research conducted, it is known that the leading sectors of East Java Province in 2017-2021 are the manufacturing sector, the water supply sector, the trade sector, the food and drink accommodation provision sector and the information sector. The results of the study partially show that the leading sector variable has a negative and insignificant effect on the employment of East Java workers with a T-count of -0.206059. And the minimum wage variable has a positive and significant effect on the employment of workers with a T count of 6.943340. Meanwhile, the results of the analysis of the elasticity of employment absorption show that the manufacturing sector, the water supply sector, the food and beverage accommodation provision sector and the information sector are elastic in absorbing workers in East Java Province with high employment elasticity values in the water supply sector. Meanwhile, the trade sector has an inelastic nature in absorbing workers in East Java Province.

With the results of this research, it is hoped that the East Java Provincial Government can continue to advance its leading sectors so that these leading sectors are able to increase their contribution to economic growth and are able to encourage improvement in other economic sectors which will be able to absorb the maximum workforce.

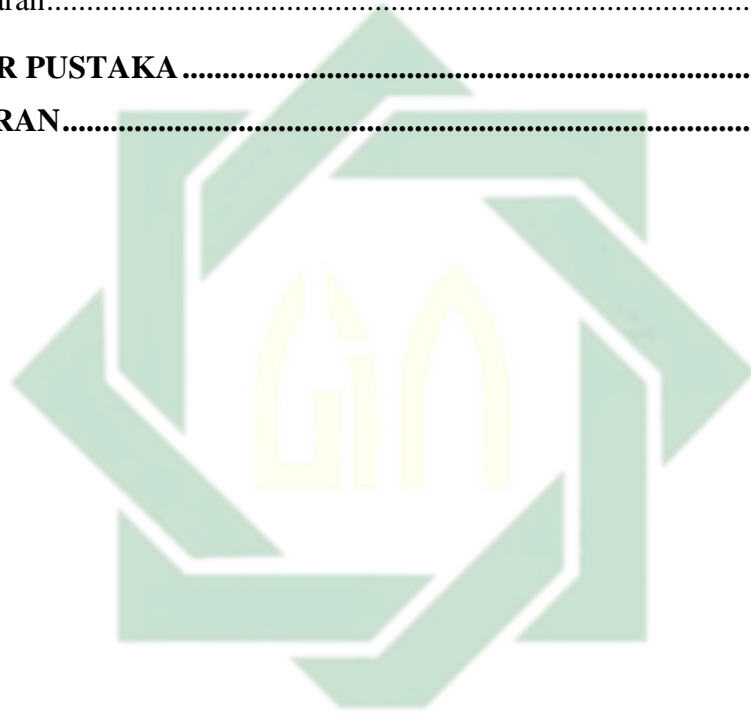
Keywords: Leading Sector, Minimum Wage, Labor Absorption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi	12
B. Sektor Unggulan	15
C. Ketenagakerjaan	19
D. Upah Minimum	35
E. Penelitian Terdahulu	43
F. Kerangka Konseptual	49
G. Pengembangan Hipotesis	51
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	50

C. Populasi dan Sampel	50
D. Variabel Penelitian	51
E. Definisi Operasional.....	51
F. Jenis dan Sumber Data	53
G. Teknik Pengumpulan Data.....	53
H. Teknik Analisis Data.....	54
1. Analisa <i>Location Quotient</i> (LQ).....	54
2. Regresi Data Panel	55
3. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja.....	62
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
1. Profil Provinsi Jawa Timur.....	64
2. Wilayah Administratif dan Demografis	65
3. Ketenagakerjaan	66
4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.....	68
5. Kebijakan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur.....	70
B. Analisis Data	71
1. Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	71
2. Regresi Data Panel	75
3. Hasil Uji Spesifikasi.....	77
4. Hasil Keputusan Model.....	79
5. Analisis Statistik Deskriptif.....	79
6. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	80
7. Hasil Uji Parsial (Uji T)	83
8. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	84
9. Hasil Uji Koefisien Determinasi R ²	84
10. Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja.....	85
C. Pembahasan.....	86
1. Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Keterserapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.....	86

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Keterserapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	92
3. Tingkat Ketersepan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	95
BAB V KESIMPULAN dan SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	109



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional	52
Tabel 4.1 Total Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	67
Tabel 4.2 Hasil Perolehan LQ Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	73
Tabel 4.3 Uji <i>Model Commom Effect</i>	75
Tabel 4.4 Uji <i>Model Fixed Effect</i>	76
Tabel 4.5 Uji <i>Model Random Effect</i>	76
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Chow</i>	77
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Hausman</i>	78
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
Tabel 4.9 Hasil Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	85
Tabel 4.10 Hasil Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	95

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 1 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	5
Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja	23
Gambar 2.2 Kurva <i>Isoquant</i> Pada Produksi	25
Gambar 2.3 Penggunaan Tenaga Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang	26
Gambar 2.4 Kurva Penawaran Tenaga Kerja	30
Gambar 2.5 Pengaruh Perubahan Tingkat Upah	32
Gambar 2.6 Penentuan Upah di Pasar Tenaga Kerja	36
Gambar 2.7 Upah Dasar Pada Serikat Pekerja	37
Gambar 2.8 Dampak Serikat Pekerja Terhadap Tingkat Upah	38
Gambar 2.9 Kerangka Konsptual	47
Gambar 4.1 PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Sektor Tertinggi Tahun 2017- 2021	69
Gambar 4.2 Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (Persen)	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya ialah fokus pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang hendak dicapai. Dewasa ini cara yang dilaksanakan pemerintah agar bisa merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik berupa meningkatkan pendapatan, pengurangan pengangguran, peningkatan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan yakni melalui pembangunan pada tiap sektor ekonomi (Djadjuli, 2018). Salah satu parameter yang dipergunakan sebagai tolak ukur suksesnya pembangunan perekonomian yang terlaksana melalui adanya pertumbuhan ekonomi atas wilayah tersebut berupa peningkatan pendapatan yang diterima baik oleh wilayah tersebut ataupun masyarakatnya (Rahmadani, 2022). Adanya kenaikan pendapatan pada masyarakat ini akan menandakan bahwa wilayah tersebut berjaya dalam pelaksanaan pembangunannya. Adanya pembangunan ekonomi bisa merangsang perkembangan perekonomian, hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi bisa mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut (Lapong *et al.*, 2019).

Pembangunan ekonomi ialah upaya pada peningkatan produktivitas dengan menggunakan sumber daya lokal berpotensi yang dimiliki oleh suatu wilayah baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia (Istiqomah, 2019). Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu cara yang dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan nasional, peningkatan pendapatan perkapita

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Amalia, 2010). Pembangunan pada ekonomi haruslah dilihat sebagai suatu cara multidimensional dalam melaksanakan percepatan ekonomi, pengentasan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dengan tetap menjaga perubahan mendasar dari institusi nasional, sikap masyarakat, serta struktur yang ada pada masyarakat.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ialah cara meningkatkan penerimaan perkapita wilayah pada jangka panjang. Perkembangan perekonomian pada teorinya menyebutkan bahwasanya permintaan akan barang maupun jasa yang tinggi akan menyebabkan potensi sumber daya lokal wilayah yang mampu menambah pendapatan serta mampu membuka peluang kerja serta merupakan faktor kunci pada penentuan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini menandakan jika pemegang kunci yang berperan penting pada perekonomian suatu wilayah adalah sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Berbagai cara dilakukan agar bisa mengoptimalkan peran sumber daya lokal wilayah tersebut agar bisa berkontribusi pada peningkatan perekonomian.

Problem utama pada pelaksanaan pembangunan suatu daerah ialah penekanan pada peraturan yang diterapkan. Peraturan pada proses pembangunan berdasarkan dari spesialisasi pada penggunaan potensi lokal wilayah tersebut. Proses pembangunan daerah dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendorong kenaikan aktivitas perekonomian (Maharani, 2020). Guna melihat peningkatan aktivitas perekonomian suatu wilayah bisa diketahui dari kecakapan pemerintah daerah dalam peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Lapong *et al.*, 2019).

Pengoptimalisasian dan peningkatan pada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peningkatan sektor unggulan pada PDRB.

Sektor ekonomi unggulan yang dimaksud ialah sektor yang mampu berkontribusi positif dalam peningkatan PDRB serta mampu mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya secara umum. Sektor ekonomi unggulan juga dikenal sebagai sektor ekonomi berpotensi dalam pengembangan untuk peningkatan kesejahteraan. Tiap-tiap pemerintah daerah haruslah mengenal potensi perekonomian yang ada pada wilayahnya (Khasanah, 2020).

Salah satu Provinsi yang hingga kini masih terus berupaya mencapai tujuan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja ialah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang dipunyai Indonesia setiap tahun selalu berupaya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bisa ditinjau dari meningkatnya nilai PDRB pada tiap-tiap sektornya.

Perekonomian Provinsi Jawa Timur ditinjau dari nilai PDRB termasuk ke dalam Provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai nilai tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut disumbang dari perekonomian kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sendiri. Jumlah kabupaten kota Provinsi Jawa Timur sebanyak 38 dengan pembagian 29 kabupaten serta 19 kota menjadikan Provinsi Jawa Timur secara nasional dapat meningkatkan perekonomiannya. Tiap-tiap kabupaten serta kota di Jawa

Timur difokuskan dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara wilayah sendiri ataupun secara provinsi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan fluktuasi pada tahun 2017 yakni 5,46%, tahun 2018-2019 yakni 5,47% dan 5,53%, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -2,33% dan pada tahun 2021 meningkat kembali yakni 3,57%. Peningkatan pertumbuhan perekonomian Jawa Timur tidak terlepas dari kontribusi sektor unggulan yang ada pada tiap wilayah kabupaten dan kota. Dari adanya perbedaan topografi dan karakteristik antar wilayah menjadikan masing-masing kabupaten kota memiliki sektor unggulan tersendiri.

Selain dari laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melihat nilai sektor unggulan serta peralihan struktural perekonomian yakni dengan melihat nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang didalamnya memperhitungkan adanya inflasi atau kenaikan harga (Hajeri *et al.*, 2015). IHK Provinsi Jawa Timur tiap tahunnya mengalami fluktuasi pada tahun 2017 IHK sebesar 130.09, tahun 2018 sebesar 133.81, tahun 2019 sebesar 136.65, tahun 2020 sebesar 104.69 serta tahun 2021 sebesar 107.26 (BPS Jawa Timur, 2021). Dengan melihat nilai IHK pemerintah bisa melihat perkembangan inflasi serta deflasi, selain itu nilai IHK oleh pemerintah dijadikan sebagai data penunjang guna melihat perkembangan perekonomian.

Dari dilihatnya besaran sumbangan tiap sektor ekonomi unggulan kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur yang ada pada tiap-tiap wilayah

tersebut, pemerintah provinsi dapat mengembangkan sektor unggulan guna terciptanya lapangan pekerjaan baru yang berimbang pada peningkatan tenaga pekerja terserap serta mengurangi pengangguran. Pemerintah provinsi selain berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga berupaya untuk memaksimalkan peningkatan jumlah keterserapan tenaga kerja. Jumlah keterserapan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur selalu meningkat tiap tahunnya namun hal ini juga diikuti dengan peningkatan pengangguran. Berdasarkan data jumlah angkatan bekerja Tahun 2017-2021 Provinsi Jawa Timur, yakni:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Gambar 1.1 Jumlah Angkatan Bekerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Tenaga kerja ialah faktor produksi yang melangsungkan aktivitas guna memproduksi suatu barang. Pada faktor produksi tenaga kerja memiliki beberapa elemen utama berupa kemampuan, fisik serta pikiran (Khasanah, 2020). Tenaga kerja disini merupakan aktor yang dipergunakan untuk pencapaian proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan kontribusinya. Tingginya tenaga pekerja pada tiap-tiap wilayah

bisa menjadi suatu keuntungan apabila dapat terserap dengan baik serta mampu memberikan produktivitasnya. Akan tetapi, tingginya jumlah tenaga pekerja ini apabila tidak mampu terserap dengan baik di tiap sektor ekonomi akan menjadi suatu problem yang mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi yakni meningkatnya pengangguran.

Tinggi rendahnya keterserapan pekerja di Provinsi Jawa Timur selain dipengaruhi dari meningkatnya total PDRB pada sektor unggulan juga turut dipengaruhi dari ketetapan pemerintah terkait tinggi rendahnya upah minimum di sektor usaha (Abdillah, 2019). Pada hal ini, penetapan upah minimum yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mempengaruhi total permintaan pekerja yang berakibat pada tinggi rendahnya keterserapan pekerja. Ketika penetapan upah semakin tinggi maka akan menurunkan total pekerja yang digunakan oleh perusahaan atau unit usaha dan begitupun sebaliknya ketika penetapan upah minimum menurun maka perusahaan atau unit usaha akan menambah total pekerja yang digunakan (Citamaha, 2018). Ketetapan upah minimum di Jawa Timur dari tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Kenaikan upah minimum di Jawa Timur selama lima tahun ialah sebesar 8% (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022).

Peningkatan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan dari adanya peningkatan akan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi direspon oleh pemerintah dengan meningkatkan penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Timur digunakan oleh pemerintah sebagai jaring

pelindung untuk setiap tenaga kerja. Tingginya penetapan upah minimum akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Disisi lain, tingginya penetapan upah yang dilakukan pemerintah malah justru memberatkan pengusaha jika pengusaha tidak bisa meningkatkan produktivitas pekerja. Ketika suatu wilayah menetapkan upah minimum terlalu tinggi akan banyak dari pengusaha untuk memindahkan bisnisnya ke wilayah lain yang penetapan upahnya relatif lebih rendah. Berpindahnya pengusaha tersebut ke wilayah lain akan turut memberikan dampak dengan berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia dan malah meningkatkan angka pengangguran (Maulidina, 2018).

Total tenaga pekerja Provinsi Jawa Timur tersebar di 17 sektor lapangan pekerjaan dengan porsi jumlah tenaga kerja tahun 2021 terbesar berada pada sektor pertanian sebanyak 6.633 juta jiwa diikuti dengan sektor perdagangan sebanyak 3.997 juta jiwa serta sektor industri pengolahan sebanyak 3.181 juta jiwa. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor ekonomi Jawa Timur yang mampu menyerap jumlah pekerja terbanyak. Adam Smith mengemukakan pertumbuhan penduduk akan merangsang pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk akan menambah pasar yang diikuti dengan peningkatan spesialisasi pada perekonomian. Adanya spesialisasi akan mempercepat proses pembangunan perekonomian. Adam Smith memandang jika jumlah penduduk ialah input potensial yang dimanfaatkan guna meningkatkan produksi suatu usaha. Semakin bertambahnya penduduk artinya bertambah pula tenaga pekerja yang bisa dipergunakan (Yunianto, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur haruslah menyadari sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan sehingga kemudian bisa dilaksanakan pengembangan atas sektor unggulan tersebut. Melalui pengembangan yang dilakukan pada tiap sektor unggulan seperti dilakukannya pembenahan dalam menunjang proses produktivitas tiap sektor ataupun diberikan anggaran alokasi diharapkan mampu mendorong sektor ekonomi lain kemudian akan diikuti dengan penciptaan lapangan kerja di tiap-tiap sektor ekonomi. Namun pada kenyataannya, meskipun sudah diketahui sektor unggulan serta sudah dilakukan pengembangan ternyata tingkat pengangguran masih tetap tinggi hal ini menandakan jika sektor unggulan belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal.

Pengujian mendasarkan rujukan yang selaras yakni pengujian yang dilaksanakan oleh (Wenagama, 2015) menunjukkan jika sektor basis (unggulan) serta upah minimum berpengaruh positif atas keterserapan tenaga pekerja pada Provinsi Bali. Pengujian yang dilakukan oleh (Triartmawati *et al.*, 2019) menyatakan jika sektor PDRB basis berpengaruh positif pada keterserapan tenaga kerja pada Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan yang dilaksanakan atas sektor ekonomi basis tersebut mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat keterserapan tenaga pekerja ikut bertambah.

Pengujian yang dilakukan juga selaras dengan hasil pengujian dari (Ibrahim *et al.*, 2022) yang menyatakan jika sektor unggulan berpengaruh atas keterserapan tenaga kerja. Pengujian yang dilaksanakan oleh (Lahama *et al.*,

2018) berbeda yakni sektor unggulan di Kabupaten Minahasa tidak berkontribusi besar atas penyerapan tenaga kerja yang disebabkan oleh berubahnya keinginan tenaga pekerja yang ingin bekerja di sektor sekunder sementara upah minimum memiliki pengaruh atas penyerapan pekerja. Pengujian yang dilaksanakan (Anggrini, 2017) menyatakan jika sektor basis Kabupaten Batang Hari yakni sektor jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap keterserapan pekerja.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang dan literatur yang telah disebutkan memperlihatkan jika sektor ekonomi unggulan memiliki pengaruh terhadap tingkat keterserapan tenaga kerja pada suatu wilayah. Pengaruh tersebut bisa pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Sektor unggulan akan berpengaruh positif ketika sektor ekonomi unggulan mampu meningkatkan keterserapan tenaga kerja. Hal tersebut juga berlaku untuk upah minimum, di mana kenaikan ataupun penurunan upah minimum turut mempengaruhi keterserapan tenaga kerja. Berdasarkan fenomena yang ada ini peneliti tertarik meneliti lebih dalam terkait sektor unggulan dan upah minimum di Provinsi Jawa Timur dengan mengambil judul **“Pengaruh Sektor Unggulan dan Upah Minimum Terhadap Keterserapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang, penulis menyusun rumusan permasalahan atas penelitian yakni:

1. Apakah sektor unggulan dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap keterserapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021?
2. Seberapa besar tingkat keterserapan tenaga kerja pada sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Terkait tujuan penelitian berlandaskan atas rumusan permasalahan ialah untuk:

1. Guna mengetahui serta menganalisis pengaruh sektor unggulan dan upah minimum terhadap keterserapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021.
2. Guna mengetahui besaran tingkat keterserapan tenaga kerja sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis berharap jika penelitian ini bisa berguna baik bagi penulis sendiri ataupun bagi orang lain. Kegunaan yang bisa diperoleh dari pengujian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bisa memberikan sumbangan pikiran pada bidang ilmiah khususnya bidang ekonomi.
- b. Diharapkan bisa menjadi tambahan rujukan literatur untuk peneliti lanjutan serta penambah khazanah pengetahuan terkait dengan pengaruh sektor unggulan dan upah minimum terhadap keterserapan tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian yang telah dilaksanakan bisa dijadikan sebagai dasar rujukan dan pertimbangan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait dalam membuat suatu kebijakan terkhusus dalam membuat kebijakan terkait pembangunan ekonomi wilayah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah suatu cara guna meningkatkan output perkapita jangka panjang serta terus menerus. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan meningkatnya kinerja suatu negara ditandai dengan peningkatan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat. Kinerja ini meningkat diikuti dengan majunya teknologi, lembaga nasional serta ideologi yang dianut (Purba *et al.*, 2021). Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1994) yakni meningkatnya output secara keseluruhan dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi ialah suatu segi dinamis dari perekonomian yang dipandang dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dan merupakan suatu reaksi adanya perubahan pada tiap-tiap sektor perekonomian (Nasir & Jamal, 2019).

Pertumbuhan ekonomi menurut Beni Kurniawan ialah mekanisme terbentuknya peningkatan produk domestik bruto ataupun pendapatan nasional riil, sehingga bisa dikatakan perekonomian suatu wilayah mengalami perkembangan ketika wilayah itu mengalami peningkatan output secara riil yang ditunjukkan adanya peningkatan taraf hidup setiap penduduk yang dinilai dengan output riil perorang (Kurniawan, 2014).

a. Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori Adam Smith yakni terjadinya peningkatan produksi dikarenakan terpenuhinya

pembagian kerja yang baik. Melalui pembagian tenaga pekerja yang baik tersebut akan membuat mekanisme pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik melalui peningkatan produktivitas dan penggunaan teknologi yang sifatnya kumulatif. Hal ini berarti ketika tersedia pasar yang memadai serta didalamnya terdapat penambahan modal maka bisa terjadi penggolongan tenaga kerja yang nantinya akan mampu meningkatkan produktivitas pekerja (Irawan & Suparmoko, 2002). Peningkatan produktivitas akan menaikkan pendapatan nasional serta meningkatkan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk disisi lain akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka pasar-pasar baru dan akan diikuti dengan spesialisasi pada kegiatan perekonomian.

b. Pertumbuhan Ekonomi Harrod Domar

Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan teori Harrod Domar ditentukan dari sisi permintaan agregat. Investasi yang dilaksanakan pada saat ini akan menaikkan jumlah barang modal dalam kegiatan perekonomian dimasa mendatang, oleh karena itu peningkatan permintaan agregat haruslah sebanyak peningkatan jumlah barang modal (Sukirno, 2006).

c. Pertumbuhan Ekonomi Schumpeter

Berdasarkan buku Schumpeter "*The Theory of Economic Development (1908)*" menjelaskan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak bisa terlaksana terus menerus namun terjadi kondisi penurunan atau fluktuasi. Fluktuasi ini dikarenakan dari kegiatan *entrepreneur* yang menerapkan adanya inovasi pada proses penghasilan barang serta jasa. Inovasi ini bisa berupa penciptaan produk baru, penemuan pasar baru ataupun diterapkannya teknologi. Schumpeter melihat ketika terjadinya peningkatan keluaran masyarakat merupakan akibat dari penerapan inovasi oleh pengusaha (Sukirno, 2000).

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan tiap harinya hal ini juga diikuti dengan penambahan pendapatan. Guna bisa mencukupi kebutuhannya maka masyarakat harus bisa berinovasi dalam pekerjaannya. Dengan demikian, adanya inovasi ini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penciptaan lapangan kerja pada kegiatan perekonomian.

d. Pertumbuhan Ekonomi Robert Solow (Neo-Klasik)

Perkembangan teori pertumbuhan neo-klasik dipelopori oleh Robert Solow dengan dominasi pemikiran perihal pertumbuhan jangka panjang terkait pendapatan perkapita yang terus mengalami peningkatan (Frisdiantara & Mukhlis, 2018). Teori Solow

menekankan pada penggunaan unsur pertumbuhan penduduk yang meningkatkan penawaran tenaga pekerja, akumulasi kapital serta penggunaan teknologi. Teori Solow dilandasi dari teori klasik jika perekonomian akan pada posisi tingkat penggunaan penuh dari ketiga unsur produksi maka perekonomian akan berkembang terus (Sukirno, 2006).

B. Sektor Unggulan

Sektor unggulan ialah sektor yang kehadirannya mampu memberikan peran penting pada pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, sebab memiliki keunggulan yang kemudian dikembangkan melalui pelaksanaan investasi (Yulistiyono *et. al.*, 2021). Sektor unggulan pada umumnya berkaitan dengan bentuk perbandingan seperti perbandingan lingkup internasional, nasional maupun lingkup regional. Pada skala internasional, sektor ekonomi bisa dikatakan sebagai sektor unggulan ketika sektor itu bisa kompetitif atas sektor serupa dengan negara lain. Sementara itu, sektor ekonomi bisa dinyatakan sebagai sektor unggulan skala nasional ketika sektor unggulan tersebut bisa kompetitif atas sektor serupa pada suatu wilayah baik skala nasional maupun regional.

Sektor unggulan berdasarkan definisi dari Tumenggung ialah sektor yang mempunyai *competitive advantage* dan *comparative advantage* atas produk yang sama dari wilayah yang lain serta mampu menambah nilai guna yang tinggi. Dengan bisa memberikan nilai tambah yang besar tersebut, sektor

unggulan dapat memberikan *multiplier effect* pada perekonomian serta mampu meningkatkan permintaan pada pasar (Sofyan, 2021).

Menurut Rachbini PDRB memberikan informasi data yang penting guna melihat output tiap sektor perekonomian dan digunakan juga guna melihat pertumbuhan ekonomi baik pada wilayah provinsi, kabupaten ataupun kota. Melalui data PDRB maka bisa dilihat sektor unggulan yang merupakan *leading sector* pada wilayah tersebut. Sektor unggulan ialah satu kelompok sektor ataupun sub-sektor yang bisa merangsang kegiatan ekonomi serta bisa mewujudkan kesejahteraan suatu wilayah yang didasarkan pada produksi berorientasi ekspor serta pembukaan lapangan kerja baru (Sofyan, 2021).

Sektor unggulan sudah dipastikan mempunyai potensi berkembang lebih besar ketimbang sektor ekonomi lainnya pada suatu wilayah sebab sektor unggulan didukung beberapa faktor yakni pertumbuhan pekerja terserap yang lebih banyak, akumulasi modal lebih tinggi serta penggunaan teknologi. Selain itu, terdapat faktor pendukung berupa penanaman investasi yang digunakan untuk mengembangkan sektor unggulan di wilayah tersebut (Yulistiyono *et al.*, 2021).

Guna memajukan potensi yang dipunyai sektor unggulan perlu diperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Sektor unggulan berkaitan dengan kualitas pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Terbaginya struktur ekonomi berupa sektor primer, sekunder serta tersier menjadikan sektor unggulan menjadi sangat penting terhadap ketiga struktur ekonomi tersebut.

- 2) Sektor unggulan memiliki kaitan dengan sektor ekonomi lain. Kaitan ini bisa berupa keterkaitan kebelakang dengan menjadi penyuplai input (*backward linkage*) maupun mempunyai kaitan kedepan sebagai sektor pengguna output (*forward linkage*). Melalui kaitan ini sektor unggulan digunakan sebagai penggerak pertumbuhan sektor ekonomi lain yang berkaitan.
- 3) Sektor unggulan mampu diandalkan pada perekonomian wilayah karena memiliki peranan yang besar. Pertumbuhan sektor unggulan bisa menaikkan bahkan bisa merubah struktural perekonomian.
- 4) Dengan ditingkatkannya sektor unggulan dapat mendorong perkembangan ekonomi suatu wilayah. Ketika suatu wilayah mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga pekerja. Peningkatan permintaan tenaga pekerja ini akan menaikkan tingkat keterserapan pekerja pada kegiatan perekonomian.
- 5) Peningkatan sektor unggulan mesti mencermati daya dukung dari SDM dan teknologi yang dipunyai wilayah berkaitan. Sektor unggulan yang dimiliki tersebut haruslah didukung oleh SDM dan teknologi yang layak dalam upayanya mengelola sektor tersebut.
- 6) Guna meningkatkan perkembangan sektor unggulan haruslah disertai dengan pertimbangan keputusan non ekonomis. Hal tersebut dikarenakan dari pentingnya kontribusi sektor unggulan sebagai sektor ekonomi yang mendukung faktor sosial serta politik

seperti pelestarian budaya lokal, stabilitas wilayah, serta lain sebagainya (Sumarsono *et al.*, 2017).

Nurmilah menjelaskan parameter terkait sektor unggulan suatu wilayah yang difokuskan pada komoditas unggulan yang digunakan sebagai pendorong pembangunan suatu wilayah, yakni:

- 1) Sektor unggulan bisa menjadi pendorong utama pada pembangunan perekonomian (*prime mover*). Sektor unggulan harus bisa memberikan sumbangan yang signifikan untuk meningkatkan produksi, pendapatan serta pengeluaran.
- 2) Mempunyai kaitan kuat baik kaitan ke depan ataupun ke belakang untuk sektor unggulan sendiri ataupun sektor non unggulan.
- 3) Mempunyai *competitive advantage* pada produk serupa atas wilayah lainnya baik secara nasional ataupun internasional yang dilihat dari biaya produksi, kualitas produk, harga produk ataupun yang lainnya.
- 4) Mempunyai kaitan dengan wilayah sektor unggulan lainnya (*complementary*) baik untuk pemenuhan pasar bagi konsumen ataupun pensuplai bahan dasar.
- 5) Sektor unggulan menerapkan adanya inovasi teknologi yang terus meningkat.
- 6) Pada skala produksi sektor unggulan bisa menyerap pekerja secara maksimal.

- 7) Sektor unggulan mampu bertahan berdasarkan jangka waktu tertentu, dimulai pada waktu kelahiran (*increase*), pertumbuhan (*growth*), puncak (*maturity*) sampai pada posisi penurunan (*decrease*). Ketika sektor unggulan mengalami penurunan maka sektor ekonomi unggulan yang lain akan mengambil alih.
- 8) Sektor ekonomi unggulan berfokus pada pelestarian sumber daya lokal dan lingkungan (Nurmilah, 2021).

C. Ketenagakerjaan

1. Konsep Tenaga Kerja

Salah satu unsur penting pada keberhasilan pelaksanaan pembangunan ialah tenaga kerja. Suatu aktivitas produksi tidak bisa berjalan dengan semestinya tanpa keberadaan pekerja sebagai faktor produksi. Kegiatan produksi tergantung dari produktivitas tenaga kerja selama proses pembuatan barang. Pada pelaksanaan pembangunan, unsur tenaga kerja yang memiliki kualitas sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan proses pembangunan sehingga diharapkan bisa menumbuhkan daya saing dari wilayah lainnya. Kualitas rendah yang dipunyai tenaga kerja akan berefek dalam perekonomian yang bisa membuat produktivitas suatu wilayah menjadi menurun (Rahmadani, 2022).

Tenaga kerja berlandaskan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 tentang ketenagakerjaan yakni laki ataupun perempuan yang akan

melaksanakan bekerja baik pada posisi terikat hubungan kerja ataupun tidak guna terpenuhinya keperluan sendiri maupun masyarakat luas (Kemenperin, 2022). Tenaga kerja berdasarkan penjelasan Payaman Jan Simanjuntak yakni meliputi penduduk yang telah atau akan melakukan bekerja, penduduk yang melaksanakan pekerjaan ataupun penduduk yang sedang mencari pekerjaan (Ismaya, 2018).

Tenaga kerja yakni penduduk berusia 15 hingga 64 tahun yang melaksanakan pekerjaan, yang memiliki pekerjaan akan tetapi sementara tidak melaksanakan pekerjaannya, penduduk yang tidak mempunyai kerja ataupun penduduk yang hendak mencari pekerjaan (BPS, 2022). Berdasarkan pendefinisian tenaga kerja diperoleh kesimpulan ringkas yakni orang yang memiliki usia kerja sehingga bisa melaksanakan pekerjaan guna mencukupi kebutuhannya sendiri ataupun orang lainnya.

Tenaga kerja terbagi pada dua pengelompokan yakni angkatan bekerja (*labour force*) dimana kelompok ini terdiri dari orang yang tergolong usia kerja seperti kelompok orang pekerja, kelompok orang pencari kerja serta kelompok orang penganggur. Sementara itu, kelompok kedua yakni angkatan bukan pekerja seperti orang pada usia pekerja yang sedang menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, serta kelompok menerima penghasilan namun tidak melaksanakan kegiatan perekonomian seperti halnya pensiunan (Ismaya, 2018).

Penyerapan tenaga pekerja menurut Todaro ialah total pekerja yang diterima guna melaksanakan pekerjaan pada suatu lapangan pekerjaan

(Sayuti & Safitri, 2020). Penyerapan tenaga pekerja yakni besarnya jumlah lapangan bekerja yang sudah terpenuhi oleh pekerja yang bisa diketahui berdasarkan jumlah keseluruhan penduduk bekerja pada sektor perekonomian tersebut (Pratiwi & Indrajaya, 2019). Penyerapan tenaga kerja tersebut akan menyerap pekerja ketika lapangan pekerjaan maupun unit usaha yang tersedia memadai bagi para pekerja yang ada. Penyerapan tenaga kerja akan terjadi pada sektor perekonomian ketika ada permintaan atas tenaga kerja. Permintaan atas tenaga kerja yang dilakukan unit usaha bergantung dari permintaan masyarakat atas barang produksi. Ketika permintaan masyarakat akan barang produksi meningkat maka akan meningkat pula permintaan jumlah pekerja yang diperlukan suatu unit perusahaan.

Keterserapan tenaga kerja bisa terpengaruhi oleh dua unsur yakni unsur eksternal serta unsur internal. Pada unsur eksternal terpengaruhi oleh tingkat pertumbuhan perekonomian, laju inflasi, tingkat pengangguran serta suku bunga. Sementara itu, pada unsur internal terpengaruhi oleh besaran upah, produktivitas pekerja serta modal yang dipunyai. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi terhadap suatu wilayah merupakan hal penting guna mencapai keberhasilan pembangunan, ketika tingkat keterserapan pekerja menurun pada perekonomian akan menyebabkan problem baru seperti peningkatan jumlah pengangguran yang akan berakibat menurunkan pertumbuhan perekonomian.

2. Permintaan Tenaga Kerja

Berdasarkan teori ekonomi permintaan dijelaskan sebagai suatu kemauan yang diikuti dengan kesanggupan guna mengkonsumsi suatu barang maupun jasa pada tiap tingkat harga di jangka waktu tertentu (Laily & Pristyadi, 2013). Sementara itu, berkaitan dengan pekerja maka permintaan tenaga kerja yakni kaitannya dengan tingkat pengupahan serta total pekerja yang diinginkan pengusaha (Sholeh, 2012).

Permintaan tenaga kerja berdasarkan penjelasan McConnell, Brue, serta Macpherson ialah penggunaan tenaga kerja dipastikan dari adanya permintaan atas barang maupun jasa atau merupakan *derived demand* (Rahmadani, 2022). Sebagai permintaan turunan menandakan jika setiap permintaan pekerja tergantung pada besaran produktifitas yang bisa diberikan tenaga kerja pada pembuatan produk serta nilai harga produk tersebut di pasar. Output yang terjual tinggi akan merangsang perusahaan menggunakan jumlah pekerja lebih besar yang dimanfaatkan guna menaikkan jumlah produksi serta penjualan (Pramusinto & Daerobi, 2020).

Teori permintaan akan tenaga kerja ialah sama dengan teori permintaan akan barang dan jasa pada ilmu ekonomi. Permintaan akan tenaga kerja biasanya dipengaruhi oleh tingkat upah serta naik turunnya permintaan akan barang dalam pasar. Menurut (Arfida, 2003) terdapat empat (4) faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja yakni:

1) Perubahan Tingkat Upah

Perubahan tingkat upah dalam pasar tenaga kerja akan mempengaruhi naik turunnya biaya yang akan dikeluarkan oleh pengusaha, ketika tingkat upah meningkat maka akan mengakibatkan:

a) Kenaikan tingkat upah akan menaikkan biaya produksi yang kemudian akan meningkatkan harga jual per unit barang produksi. Kenaikan harga dari barang produksi oleh konsumen akan berakibat pada menurunnya konsumsi barang atau bahkan konsumen tidak akan mengkonsumsi barang tersebut. Dari hal tersebut oleh pengusaha selaku produsen akan meresponnya dengan melakukan pengurangan total barang yang akan diproduksi. Kemudian, dari dilakukannya pengurangan jumlah produksi barang maka produsen juga akan mengurangi penggunaan tenaga kerja.

b) Naiknya tingkat upah akan membuat pengusaha lebih memilih untuk menggunakan teknologi yang padat modal pada proses produksi seperti penggunaan mesin, di mana hal ini akan menggantikan kebutuhan akan pemakaian tenaga pekerja.

2) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi yang digunakan pada proses produksi turut berdampak pada permintaan faktor produksi, pada hal ini kemajuan teknologi akan meningkatkan produktivitas pekerja terdidik. Teknologi yang digunakan akan membantu pekerja guna bisa menghasilkan total produksi barang yang meningkat serta dapat mengefisienkan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali produksi barang. Namun, disisi lain penggunaan teknologi sebagai faktor produksi juga bisa berakibat pada penurunan permintaan pekerja.

3) Permintaan Akan Barang

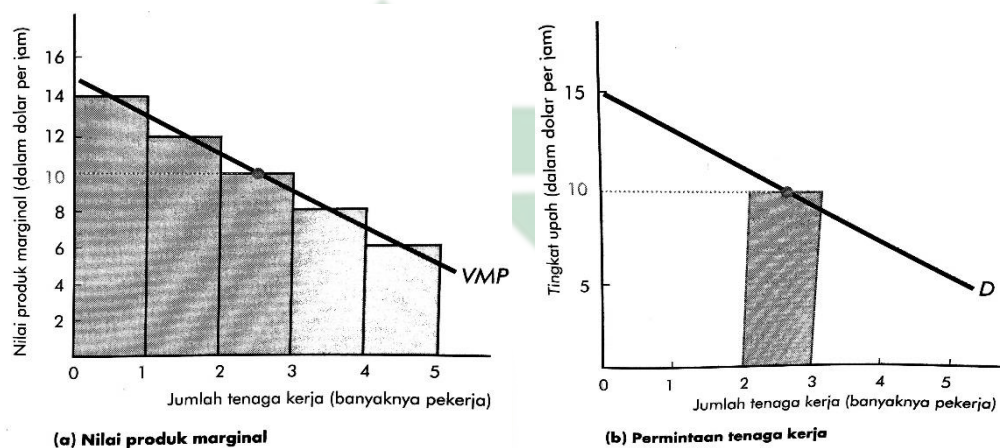
Ketika permintaan konsumen akan suatu barang pada pasar meningkat oleh produsen akan direspon untuk bisa meningkatkan produksi barang tersebut. Selanjutnya, guna memenuhi permintaan barang tersebut produsen akan menambah total pekerja.

4) Kualitas Tenaga Kerja

Indeks kualitas pekerja bisa dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Ketika pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja semakin tinggi maka permintaan kerja juga meningkat.

Permintaan akan tenaga kerja oleh perusahaan atau produsen berkaitan dengan nilai produk marginal dari setiap tambahan pekerja bagi

perusahaan (Parkin, 2017). Dari nilai produk marjinal tersebut perusahaan bisa melihat pendapatan yang diperoleh dengan mempekerjakan satu pekerja lagi. Selain dari, nilai produk marjinal permintaan tenaga kerja juga berhubungan dengan tingkat upah.



Sumber: Parkin, 2023

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Pada gambar 2.1 menjelaskan gambar (a) adalah kurva dari produk marjinal, sedangkan untuk gambar (b) merupakan kurva permintaan tenaga kerja. Ketika tingkat upah ialah \$10 maka perusahaan mempekerjakan 2 pekerja dengan nilai produk marjinal tenaga kerja ialah \$12 jam per jam. Pengusaha bisa menerima keuntungan \$2 per jam untuk kedua pekerja. Jika pengusaha mempekerjakan 3 pekerja maka nilai produk marjinal pekerja adalah \$10 per jam.

Untuk kurva permintaan tenaga kerja terdapat pada gambar (b) dengan garis D. Dengan \$10 per jam, jumlah tenaga kerja yang diminta adalah 3 pekerja. Akan tetapi, ketika tingkat upah naik menjadi \$12 per

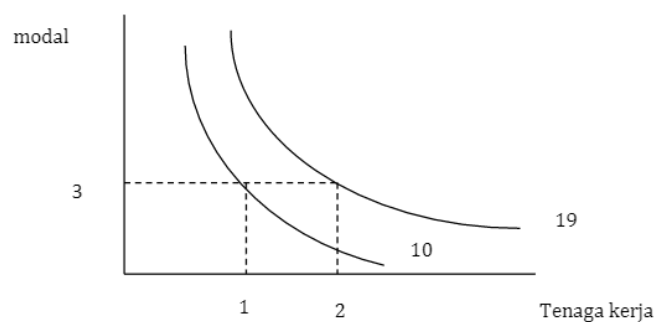
jam maka perusahaan akan mengurangi pekerja menjadi 2 pekerja. Jika tingkat upah turun menjadi \$8 per jam maka perusahaan akan menambah pekerja menjadi 4 pekerja. Perubahan tingkat upah pada permintaan tenaga kerja akan menyebabkan jumlah pekerja berubah serta menggeser kurva permintaan tenaga kerja.

Permintaan atas tenaga kerja sendiri terurai menjadi permintaan atas tenaga pekerja jangka pendek serta permintaan atas tenaga pekerja jangka panjang. Permintaan atas tenaga pekerja jangka pendek diasumsikan modal yang dikeluarkan unit usaha ialah tetap sehingga perusahaan tidak bisa menambah ataupun mengurangi proporsi usaha seperti menambah atau menjual peralatan produksi. Perusahaan hanya bisa menambah jumlah produksi dengan meningkatkan input pekerja serta bahan dasar produksi. Sementara itu, permintaan atas tenaga kerja jangka panjang diasumsikan modal yang dikeluarkan oleh unit usaha ialah tidak tetap sehingga perusahaan bisa menambah ataupun mengurangi proporsi usaha seperti menambah input baru selain pekerja (Kamal, 2020).

1) Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek

Permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek ialah jangka waktu di mana terdapat minimal satu input dalam produksi yang tidak bisa dirubah dalam hal ini input produksi yang tidak bisa dirubah ialah modal. Penggunaan tenaga kerja dan modal bisa digambarkan dengan penggunaan kurva *isoquant*

(Sukarniati, 2019). Kurva *isoquant* menggambarkan kombinasi dari faktor produksi yakni pekerja dan modal yang bisa dimanfaatkan guna menghasilkan output yang sama. Penggambaran kurva *isoquant* pada permintaan tenaga kerja jangka pendek bisa dilihat pada gambar 2.2 berikut.



Sumber: Sukarniati, 2023

Gambar 2.2 Kurva *Isoquant* Pada Produksi Mentega

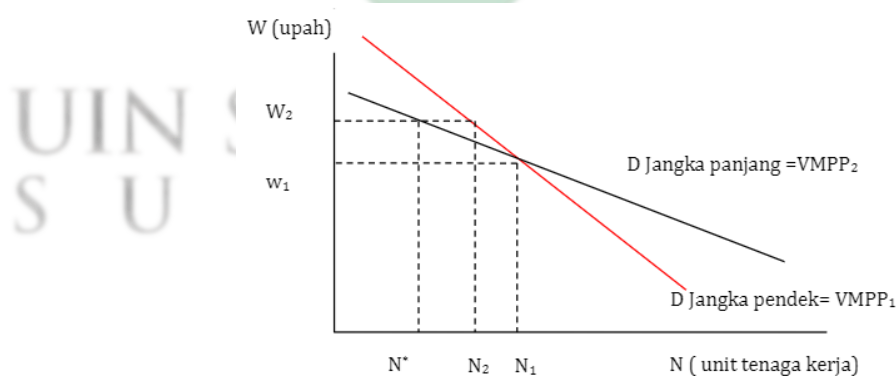
Pada gambar 2.2 diasumsikan jika perusahaan bisa meningkatkan outputnya dengan menambahkan modal, tenaga kerja atau menambahkan kedua output tersebut. Akan tetapi, karena dalam permintaan tenaga kerja jangka pendek modal dianggap konstan dan hanya bisa menambahkan tenaga kerja.

Selanjutnya, untuk bisa meningkatkan total produksi maka produsen bisa menambahkan penggunaan tenaga kerja. Produsen pada jangka pendek akan bersedia menambah tenaga kerja hanya ketika upah yang diberikan pada pekerja tambahan lebih rendah dari upah pekerja sebelumnya. Hal ini diakibatkan

karena penambahan satu tenaga kerja hanya bisa menghasilkan sedikit tambahan output dan malah akan menurunkan total output dari sebelumnya. Hal tersebut juga yang mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja pada jangka pendek akan selalu memperlihatkan kemiringan negatif.

2) Permintaan Tenaga Kerja Jangka Panjang

Permintaan tenaga kerja jangka panjang ialah suatu periode produsen atau perusahaan bisa melaksanakan perubahan pada inputnya baik input modal ataupun tenaga kerja. Pada jangka panjang respon berbeda dilakukan oleh produsen atas perubahan tingkat pengupahan yang dipengaruhi oleh pemahaman produsen terkait penggunaan input yang murah (Sukarniati, 2019).



Sumber: Lestari Sukarniati, 2023

Gambar 2.3 Penggunaan Tenaga Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Pada gambar 2.3 diketahui kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek ditunjukkan oleh kurva VMPP₁. Pada gambar 2.3 diasumsikan perusahaan awalnya berada pada keseimbangan jangka pendek dengan tingkat upah pada W_1 dan penggunaan tenaga kerja pada N_1 . Asumsi kedua yakni perusahaan berada pada keseimbangan jangka panjang dan menghasilkan output dengan penggunaan tenaga kerja dan modal paling rendah.

Jika suatu saat tingkat upah meningkat menjadi W_2 maka pada jangka pendek produsen akan mengalami peningkatan pada biaya tenaga kerja dan berakibat pada pengurangan pekerja dari N_1 ke N_2 pada sepanjang kurva VMPP. Sedangkan, pada jangka panjang produsen akan melakukan penyesuaian dengan mengganti penggunaan pekerja dengan modal seperti penggunaan teknologi, sehingga pada jangka panjang total pekerja yang digunakan hanya seanyak N^* (Sukarniati, 2019).

3. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran dalam teori ekonomi ialah hubungan antara total barang ataupun jasa yang ditawarkan atas bermacam tingkat harga di pasar serta di waktu tertentu. Sementara itu, penawaran pekerja ialah kaitan antara tingkat pengupahan dengan total pekerja serta jam kerja yang ditawarkan oleh pekerja (Sukarniati, 2019). Penawaran atas tenaga kerja berdasarkan

penjelasan Zafris dan David yakni pengukuran jumlah pekerja berdasarkan pada penawaran jam kerja dan jumlah orang yang akan dikerjakan selama waktu tertentu (Rahmadani, 2022).

Keseluruhan dari jumlah tenaga kerja yang tersedia pada perekonomian bergantung dari keseluruhan total penduduk, total angkatan bekerja serta penawaran total jam bekerja yang disediakan angkatan bekerja. Ketika total angkatan bekerja meningkat akan diikuti penawaran atas tenaga kerja juga ikut meningkat. Terdapat sejumlah unsur yang bisa mempengaruhi penawaran pekerja, yakni:

1) Jumlah Penduduk

Ketika keseluruhan penduduk jumlahnya besar maka total angkatan bekerja serta tenaga kerja juga besar. Banyaknya total keseluruhan penduduk bisa berdampak atas perekonomian sehingga diperlukan kapasitas ekonomi guna mencukupi tersedianya lapangan serta kesempatan kerja.

2) Usia

Perbedaan usia diantara pekerja akan berdampak berbeda terkait dengan kontribusi penduduk pada kegiatan memproduksi barang ataupun jasa.

3) Jam Kerja

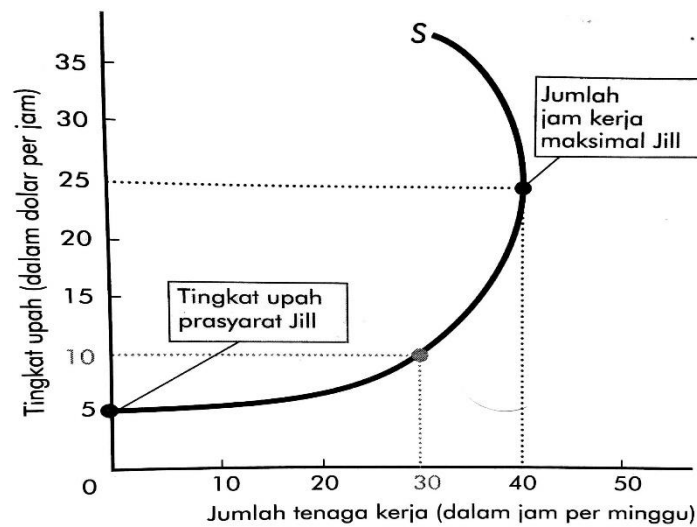
Jam kerja tiap orang tidaklah sama, terdapat orang yang memanfaatkan waktu yang dipunyai guna bekerja, namun terdapat juga orang yang memanfaatkan waktu yang dipunyai guna bekerja

dalam beberapa jam setiap harinya. Ketika suatu penduduk mempunyai jumlah pekerja dengan jam bekerja yang sedikit daripada jumlah yang tercatat akan berdampak pada penurunan produktivitas pekerja.

4) Produktivitas Pekerja

Adam Smith menjelaskan jika sumber daya manusia merupakan sumber daya utama. Sumber daya manusia yang berproduktivitas tinggi penting peranannya pada pembangunan perekonomian. Ketika sumber daya manusia berproduktivitas rendah atau tidak mempunyai kualitas maka pemanfaatan sumber daya lainnya tidak dapat dilakukan secara maksimal. Sementara itu, sumber daya manusia yang berproduktivitas tinggi bisa dipergunakan guna meningkatkan produktivitas sumber daya lain berupa tanah, permesinan, dan peralatan produksi secara maksimal (Sukarniati, 2019).

Penawaran tenaga kerja dalam pasar diturunkan dari keputusan terkait dari penawaran tenaga kerja yang dibuat oleh setiap rumah tangga. Dalam penawaran tenaga kerja, seseorang bisa mengalokasikan waktu yang dimiliki untuk bekerja atau menikmati waktu luang. Michael Parkin menjelaskan jika kurva pada penawaran tenaga kerja berbentuk melengkung ke belakang (*backward bending*) (Parkin, 2017).



Sumber: Parkin, 2023

Gambar 2.4 Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Pada gambar 2.4 diasumsikan diasumsikan seorang pekerja ingin mendapatkan pekerjaan sedikitnya yakni \$ per jam dan merupakan upah prasyarat agar orang tersebut mau bekerja. Tingkat upah pekerja tersebut adalah \$10 per jam dan pada tingkat upah tersebut ia mau bekerja 30 jam perminggu. Pada satu titik pekerja tersebut ditawari upah \$25 perjam dan bersedia bekerja 40 jam per minggu. Namun, pada tingkat upah di atas \$ 25 per jam maka prioritas pekerja akan berubah dan condong pada waktu luang. Pekerja dengan tingkat upah \$25 tersebut akan mengurangi jam kerja dan memilih untuk menghabiskan waktu luang untuk bersantai.

Berdasarkan penjelasan Michael Parkin, keputusan penawaran tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi yakni semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan, semakin besar jumlah yang bisa ditawarkan oleh pekerja. Tingginya tingkat upah memaksa pekerja untuk bekerja lebih lama.

Sementara itu, efek pendapatan ialah semakin tinggi tingkat upah seorang pekerja maka semakin tinggi pendapatan yang diterimanya. Semakin tinggi pendapatan, hal-hal lain tetap sama sehingga mendorong pekerja meningkatkan permintaannya akan barang dan jasa. Waktu luang merupakan salah satunya (Parkin, 2017).

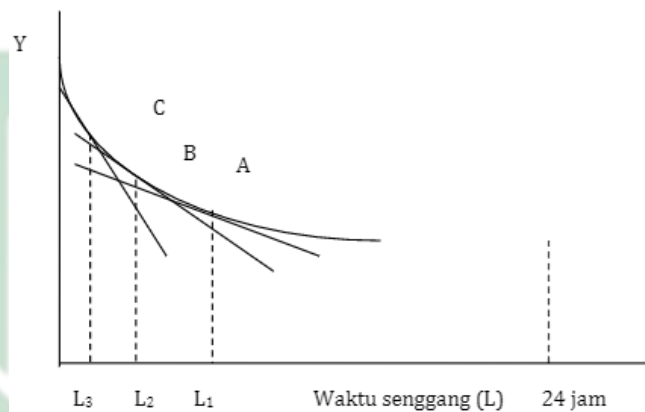
Sukarniati menjelaskan jika penawaran tenaga kerja terbagi menjadi penawaran tenaga kerja jangka pendek dan penawaran tenaga kerja jangka panjang. Pada penawaran tenaga kerja jangka pendek, tenaga kerja tidak bisa merubah atau melakukan penyesuaian pada satu periode. Sedangkan, pada penawaran jangka panjang pekerja bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut (Sukarniati, 2019).

1) Penawaran Tenaga Kerja Jangka Pendek

Penawaran tenaga kerja jangka pendek ialah suatu waktu di mana pekerja pada total penduduk tertentu yang mempunyai keahlian tertentu memilih jam kerja terbaik yang bisa ditawarkan pada kegiatan pasar yang kemudian bisa memaksimalkan utilitasnya. Utilitas pada penawaran jangka pendek ialah kepuasan pekerja yang diakibatkan dari adanya kesempatan kerja yang mampu menghasilkan suatu produk serta bisa mendapatkan upah dengan memanfaatkan waktu luang yang dipunyai.

Pada konsep utilitas penawaran jangka pendek, ketika tenaga kerja mendapati terjadi kenaikan tingkat upah maka tenaga kerja menjadikan waktu yang dimiliki sebagai suatu hal yang berharga

dan kemudian akan mengurangi waktu sengang yang dimiliki dengan bekerja. Dengan dimaksimalkannya utilitas tersebut oleh pekerja akan mengakibatkan total jam kerja yang dimiliki akan meningkat. Kurva penawaran tenaga kerja jangka pendek bisa dilihat pada gambar 2.5 berikut.



Sumber: Sukarniati, 2023

Gambar 2.5 Pengaruh Perubahan Tingkat Upah

Pada gambar 2.5 memperlihatkan dari adanya perubahan tingkat upah yang meningkat akan menyebabkan waktu menjadi lebih berharga, sehingga akan mengakibatkan pekerja akan mengurangi waktu luangnya dan menggantikannya dengan waktu bekerja dan merubah total jam kerja menjadi meningkat dari L_1 ke L_2 ke L_3 .

2) Penawaran Tenaga Kerja Dalam Jangka Panjang

Penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang adalah suatu periode yang dimungkinkan pekerja guna melakukan

penyesuain-penyesuain. Dalam penawaran tenaga kerja jangka panjang telah dihilangkan asumsi terkait total angkatan tenaga kerja, total penduduk dan keterampilan yang dimiliki. Dalam analisis penawaran tenaga kerja jangka panjang yang dilihat ialah kaitan antara tingkat partisipasi kerja perempuan yang telah menikah, penurunan partisipasi pekerja usia lanjut dan hubungan antara tingkat fertilitas dengan tingkat upah (Sukarniati, 2019).

D. Upah Minimum

Upah Minimum menurut Asyhadie ialah standar minimum yang dipakai oleh perusahaan ataupun unit usaha dalam memberikan upah kepada pekerja, buruh ataupun pegawainya (Asyhadie, 2007). Menurut Hasibuan menjelaskan jika upah ialah segala bentuk penerimaan (*earning*) pada jangka waktu tertentu yang didapat pekerja, buruh ataupun pegawai berupa uang maupun barang atas kegiatan ekonomi yang telah mereka lakukan (Asyhadie, 2007). Sadono Sukirno upah ialah pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pekerja (Sukirno, 2016). Dalam penetapan upah minimum didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tertanggal 29 Mei 1989 terkait Upah Minimum. Upah minimum saat ini dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) sebab ruang cakupannya yakni seluruh Provinsi. Selain itu, UMP juga dikenal dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Berdasarkan dari pengertian upah diatas masih ada beberapa teori-teori terkait upah yang juga dijadikan sebagai dasar dari penetapan upah, antara lain yakni:

1) Teori Upah Malthus

Teori upah menurut Malthus ialah berkaitan dengan perubahan penduduk dalam hal ini adalah tingkat upah bisa terjadi akibat dari adanya permintaan dan penawaran. Ketika penduduk meningkat maka akan menekan tingkat upah. Begitu pun sebaliknya, tingkat upah akan naik ketika jumlah penduduk berkurang. Malthus berpendapat jika upah dalam jangka panjang akan meningkat ataupun menurun mengikuti pertumbuhan penduduk (Arfida, 2003).

2) Teori Upah David Ricardo

Upah yang wajar menurut David Ricardo yakni upah yang cukup guna memenuhi kebutuhan pekerja beserta keluarganya serta sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ketika upah yang diberikan terlalu besar akan mempengaruhi total penjualan yang berakibat pada biaya produksi yang ikut besar. Akan tetapi, ketika tingkat upah yang ditetapkan terlalu sedikit maka pekerja akan hidup miskin (Aryanti *et al.*, 2019).

3) Teori Upah Ferdinand Lassalle

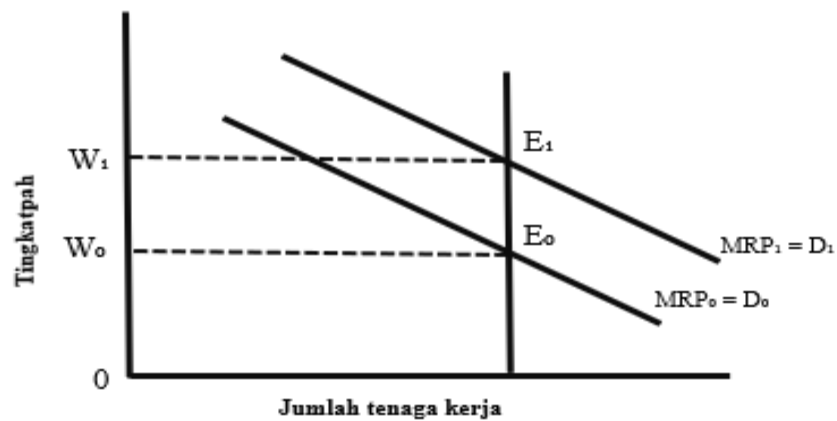
Teori upah menurut Ferdinand Lassalle dikenal dengan istilah upah besi. Lassalle mengemukakan upah tenaga kerja ditentukan dari hukum permintaan dan penawaran pada pasar akan berada dibawah

hal ini diakibatkan oleh pengusaha yang ingin memperoleh keuntungan besar sehingga pekerja terpaksa untuk menerima upah yang telah ditentukan serta pekerja hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup minimumnya saja (Aryanti *et al.*, 2019).

4) Teori Upah Jhon Stuart Mill

Teori upah Jhon Stuart Mill dikenal dengan teori dana upah. Pada teori ini upah yang diterima pekerja didasarkan dari besar kecilnya total dana yang ada di masyarakat. Ketika dana yang dimiliki besar maka upah yang diterima pekerja akan sama besar. Akan tetapi, ketika dana yang ada pada masyarakat terbatas jumlahnya maka upah yang akan diterima pekerja akan berkurang. Karena hal ini pekerja harus bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Teori dana upah menganjurkan pengusaha untuk menyediakan dana khusus guna menanggung tanggungan pekerja yang besar yang dikenal dengan dana anak-anak (Aryanti *et al.*, 2019).

Sejalan dengan teori upah yang telah disebutkan diatas, Sadono Sukirno menjelaskan hubungan antara upah dengan tingkat produktivitas yang akan ditawarkan oleh pekerja kepada pengusaha (Sukirno, 2016). Kenaikan upah yang ada pada pasar tenaga kerja bergantung pada produktivitas. Sadono Sukirno menjelaskan hubungan tingkat upah terhadap produktivitas pekerja dengan teori permintaan, seperti pada gambar 2.6 berikut.



Sumber: Sukirno, 2023

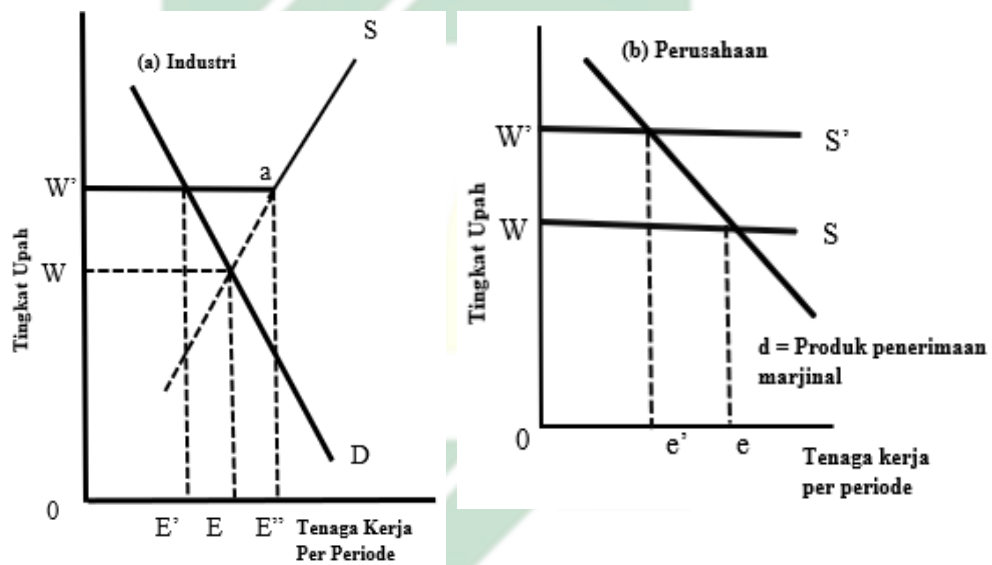
Gambar 2.6 Penentuan Upah di Pasar Tenaga Kerja

Pada gambar 2.6 menjelaskan jika $MRP_0 = D_0$ dan $MRP_1 = D_1$ yang merupakan hasil penjualan marjinal di mana MRP merupakan kurva permintaan pekerja. Pada gambar menunjukkan jika garis MRP_1 diatas garis MRP_0 yang berarti pada tiap tingkat penggunaan pekerja, menunjukkan hasil penjualan marjinal sebanyak MRP_1 lebih tinggi daripada penjualan marjinal MRP_0 .

Kemudian dimisalkan jika harga barang adalah sama, memperlihatkan MRP_1 lebih tinggi dari MRP_0 dan mencerminkan perbedaan produktivitas. Kurva MRP_1 menunjukkan kegiatan memproduksi barang yang hasil penjualan marginalnya lebih tinggi dari MRP_0 . Hal tersebut memperlihatkan produktivitas MRP_1 lebih tinggi daripada MRP_0 . Selanjutnya, jika dimisalkan jika jumlah penawaran tenaga kerja dalam pasar ditunjukkan oleh kurva S yang memotong MRP_0 di titik E_0 dan memotong MRP_1 di E_1 . Dengan demikian, apabila permintaan tenaga kerja adalah $MRP_0 = D_0$ maka upah

tenaga kerja adalah W_0 . Sedangkan, apabila permintaan tenaga kerja adalah $MRP_1 = D_1$ maka tingkat upah tenaga kerja sebesar W_1 .

Penentuan upah oleh beberapa ahli ekonomi dikatakan juga berkaitan dengan adanya serikat pekerja. Serikat pekerja mencoba menegosiasikan tingkat upah secara umum pada industri yang bersangkutan untuk tiap-tiap tingkatan pekerja (McEachern, 2001).



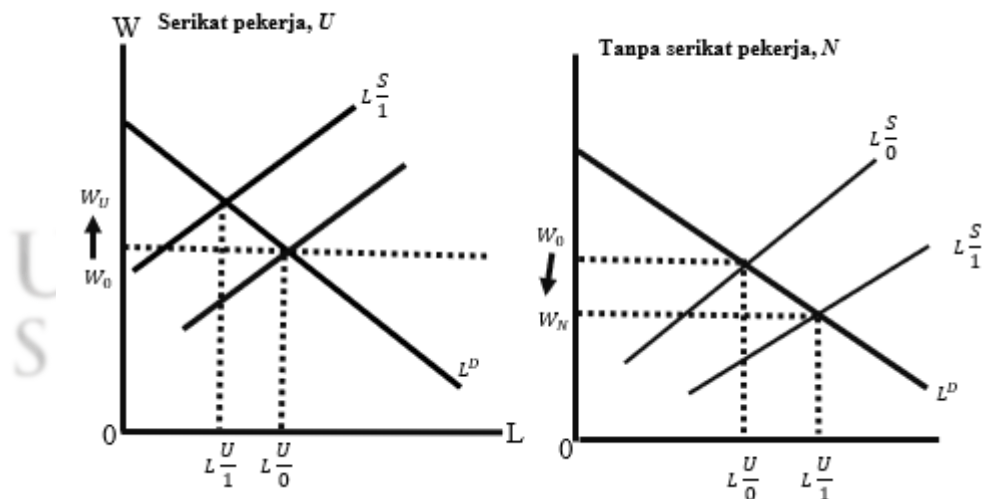
Sumber: McEachern, 2023

Gambar 2.7 Upah Dasar pada Serikat Pekerja

Pada gambar 2.7 (a) menunjukkan tingkat upah *equilibrium* ketika tidak ada serikat pekerja adalah W . Pada tingkat tersebut perusahaan pada gambar 2.7 (b) mempekerjakan pekerja hingga pada tingkat yang menyebabkan produk penerimaan marginal sama dengan W . Tiap perusahaan mempekerjakan hingga kualitas e di mana *employment total* ditunjukkan tanda E . Ketika serikat pekerja bisa menegosiasikan tingkat upah W' diatas

tingkat keseimbangan, maka kurva penawaran yang dihadapi oleh perusahaan akan bergeser ke atas yakni tanda s' . Kemudian perusahaan menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil yakni e' dan employment total turun ke E' . Selanjutnya pada tingkat upah W^1 yang mengakibatkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja sebesar E' ke E'' (McEachern, 2001).

Dampak adanya serikat pekerja terhadap penetapan upah di pasar tenaga kerja telah dibahas oleh Rokhedi Santoso yang menjelaskan jika pasar tenaga kerja dibedakan menjadi dua yakni pasar yang memiliki serikat pekerja (U) dan pasar yang tidak memiliki serikat pekerja (N) (Santoso, 2012). Pada kondisi awal pekerja dianggap sama atau identik pada kedua pasar serta tidak memiliki biaya mobilitas tenaga kerja dari pasar U ke pasar N.



Sumber: Santoso, 2023

Gambar 2.8 Dampak Serikat Pekerja Terhadap Tingkat Upah

Pada kondisi awal keseimbangan, tingkat upah adalah sebesar W_0 , ketika serikat pekerja masuk dalam pasar maka tingkat upah menjadi W_u . Dari masuknya serikat pekerja menjadikan tingkat kesempatan kerja menurun dari $L \frac{u}{0}$ ke $L \frac{u}{1}$. Tenaga kerja yang tidak terserap pada pasar U akan berpindah ke pasar N. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja pasar N meningkat dari $L \frac{u}{0}$ ke $L \frac{u}{1}$. Akibat lainnya ialah menurunnya tingkat upah pasar N dari W_0 ke W_n .

Hubungan antara upah minimum dengan penyerapan tenaga pekerja yakni upah mempunyai kaitan positif terhadap penyerapan pekerja sebab ketika upah mengalami peningkatan akan diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat serta berakibat pada bertambahnya permintaan sehingga diikuti dengan bertambahnya pelaku usaha yang masuk ke dalam pasar yang kemudian akan menambah penyerapan tenaga pekerja (Kuncoro, 2002). Disisi lain, peningkatan upah oleh pelaku usaha akan direspon dengan meningkatkan total produksinya sehingga dari ditingkatkan produksi tersebut pelaku usaha bisa berekspansi atau menambah jumlah usahanya.

Hal ini juga selaras dengan teori klasik yang menjelaskan jika kaitan dari upah dengan penyerapan tenaga kerja yang meningkat akan bisa mengakibatkan bertambahnya total penduduk sehingga permintaan akan barang juga meningkat, sehingga guna memenuhi permintaan tersebut pelaku usaha akan meningkatkan total produksi yang berarti pelaku usaha akan menambah faktor-faktor produksi salah satunya tenaga kerja. David Ricardo juga mengemukakan jika pekerja akan bertambah ataupun menurun

bergantung dari tingkat upah nominal. Ketika tingkat upah nominal diatas tingkat upah minimal ataupun tingkat upah alamiah maka akan meningkatkan jumlah pekerja. Namun sebaliknya, jika tingkat upah nominal berada dibawah tingkat upah minimal maka pekerja akan menurun (Apipah, 2018).

Disisi lain, peningkatan upah yang ditetapkan memiliki hubungan negatif dengan keterserapan tenaga kerja yakni ketika upah yang ditetapkan terlalu tinggi akan mengurangi jumlah keterserapan tenaga kerja. Hubungan negatif antara naiknya upah dan penyerapan tenaga kerja dijelaskan oleh Ali Musafak yakni adanya kenaikan tingkat upah akan berakibat pada menurunnya jumlah pekerja yang diminta oleh pengusaha. Adanya kenaikan tingkat upah mengakibatkan pengusaha untuk mengganti pemakaian tenaga kerja dengan input yang lebih murah seperti penggunaan peralatan mesin. Kenaikan upah minimum juga akan mengakibatkan pengusaha menaikkan harga jual per unit produk, sehingga konsumen akan mengurangi pembelian produk. Kenaikan harga jual produk juga direspon oleh pengusaha dengan pengurangan total produksi sehingga akan mengurangi pemakaian tenaga kerja (Musafak, 2019).

Hubungan negatif antara kenaikan upah dan penyerapan tenaga kerja juga dijelaskan oleh Simanjuntak yakni naiknya upah turut mempengaruhi kesempatan kerja. Semakin meningkat upah yang ditetapkan akan mempengaruhi peningkatan biaya produksi yang berakibat pada pengusaha untuk menerapkan efisiensi dengan melakukan pengurangan penggunaan tenaga kerja. Hal tersebut kemudian berakibat pada rendahnya tingkat

kesempatan kerja serta dapat meningkatkan tingkat pengangguran (Simanjuntak, 1998).

E. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Analisis	Alat Analisis	Hasil Analisis
1	Potensi Sektoral dan Dampaknya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Makassar Oleh: Agung Widhi Kurniawan dan Basri Bado (2017)	Penelitian Deskriptif Kuantitatif	- Analisis Location Quotient - Regresi Linier Berganda	Hasil pengujian berdasarkan nilai LQ diketahui di Kota Makassar sektor basis yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor akomodasi makan-minum, sektor jasa-jasa, sektor pertambangan, sektor pengadaan listrik, gas, air, sektor bangunan, sektor transportasi-komunikasi serta sektor keuangan. Hasil uji statistik dengan regresi linier berganda memperlihatkan perolehan yakni variabel pertumbuhan ekonomi, sektor basis serta investasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan atas keterserapan pekerja. Sementara itu, UMR berpengaruh positif serta signifikan atas keterserapan pekerja.
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Basis Di Provinsi Bali	Penelitian Kuantitatif Deskriptif	- Analisis Location Quotient - Analisis Shift-Share - Analisis Regresi	Perolehan pengujian didapati sektor yang terhitung sektor basis Provinsi Bali tahun 2000-2015 yakni sektor listrik serta air, sektor perdagangan, sektor hotel,

	Oleh : I Wayan Wenagama (2017)			sektor transportasi serta komunikasi. Perolehan pengujian trend keterserapan tenaga pekerja sektor basis serta bukan basis di Provinsi Bali memperlihatkan penambahan yang berarti. Perolehan pengujian regresi antar variabel sektor basis, upah minimum serta pengeluaran pemerintah memperlihatkan pengaruh yang berarti atas keterserapan tenaga pekerja sektor basis di Provinsi Bali.
3.	Analisis Hubungan Sektor Ekonomi Basis Dengan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Merangin Oleh: Dedi Setiawan, dkk (2018)	Penelitian Kuantitatif Deskriptif	- Analisis Location Quotient - Analisis Korelasi Pearson	Perolehan pengujian LQ memperlihatkan sektor basis Kabupaten Merangin tahun 2008-2015 yakni sektor bangunan, sektor pertanian serta sektor jasa-jasa. Sementara itu, berdasarkan hasil analisis korelasi pearson yakni diketahui jika hanya terdapat 1 sektor basis yang mempunyai hubungan positif berpengaruh kuat pada keterserapan pekerja di Kabupaten Merangin. Hal itu menunjukkan jika hubungan positif yang kuat antara pertumbuhan ekonomi sektor basis Kabupaten Merangin tak berpengaruh kuat sebab tidak semua sektor basis memperlihatkan kaitan yang kuat atas keterserapan pekerja.

4.	<p>Analisis Peran Sektor Basis dan Non-Basis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Oleh: Hadina Rizky Amalia dan Herry Yulistiyono (2020)</p>	<p>Penelitian Kuantitatif Deskriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Location Quotient - Analisis Shift-Share - Model Rasio Pertumbuhan - Elastisitas Tenaga Kerja - Analisis Koefisiensi Tenaga Kerja 	<p>Perolehan pengujian LQ diketahui jika sektor basis Kabupaten Gresik 2011-2017 yakni ada tiga sektor. Sementara itu, perolehan pengujian Shift-Share memperlihatkan secara menyeluruh rata-rata perkembangan perekonomian lebih tinggi secara yakni sektor pertanian, penyediaan akomodasi makan serta minum, bangunan, perdagangan, sektor transportasi serta pergudangan, sektor informasi serta komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan. juga sektor kesehatan. Perolehan MRP memperlihatkan jika sektor pengadaan listrik serta gas menjadi sektor penggerak perkembangan perekonomian. Perolehan elastisitas tenaga pekerja sektor pertambangan serta sektor pengadaan listrik juga gas menunjukkan perolehan elastisitas tertinggi.</p>
5.	<p>Hubungan Sektor Ekonomi Basis Dengan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat Oleh: Datje</p>	<p>Penelitian Kuantitatif Deskriptif</p>	<p>Analisis Location Quotient</p>	<p>Perolehan pengujian Location Quotient memperlihatkan jika Kabupaten Halmahera Barat sektor basisnya yakni sektor pertanian serta sektor industri pengolahan. Sementara, untuk sektor</p>

	Renjaan (2020)			pertanian menyumbang peran tinggi atas keterserapan tenaga pekerja dengan perolehan $LQ > 1$ (1,67). Untuk sektor industri pengolahan yang merupakan sektor potensial mampu menyerap sebanyak 2.567 jiwa dari total 52.06 jiwa tenaga kerja.
6.	PDRB Basis dan Non-Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2017-2019 Oleh: Ayu Triartmawati, dkk (2020)	Penelitian Kuantitatif Deskriptif	- Analisis LQ Analisis - Regresi Linier Sederhana	Perolehan pengujian yang dilaksanakan memperlihatkan adanya kaitan atas keterserapan tenaga pekerja. Pada hasil penelitian menunjukkan sektor basis mampu mempekerjakan pekerja sejumlah 6.3032 jiwa, sedangkan untuk sektor bukan basis hanya bisa mempekerjakan pekerja kerja sejumlah 5.36297 jiwa. Sementara itu, perolehan R^2 yakni 0.700236 yang memperlihatkan jika sektor basis serta bukan basis bisa menyerap pekerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 sebanyak 70,02% sementara itu lainnya sebanyak 29,98% terpengaruhi oleh variabel lain yang tak diuji.
7.	Sektor Basis Kabupaten Batang Hari dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan	Penelitian Kuantitatif Deskriptif	- Analisis Location Quotient - Analisis Jalur (Path Analysis)	Perolehan pengujian Location Quotient memperlihatkan jika Kabupaten Batang Hari tahun 2008-2013 yakni sektor perdagangan serta

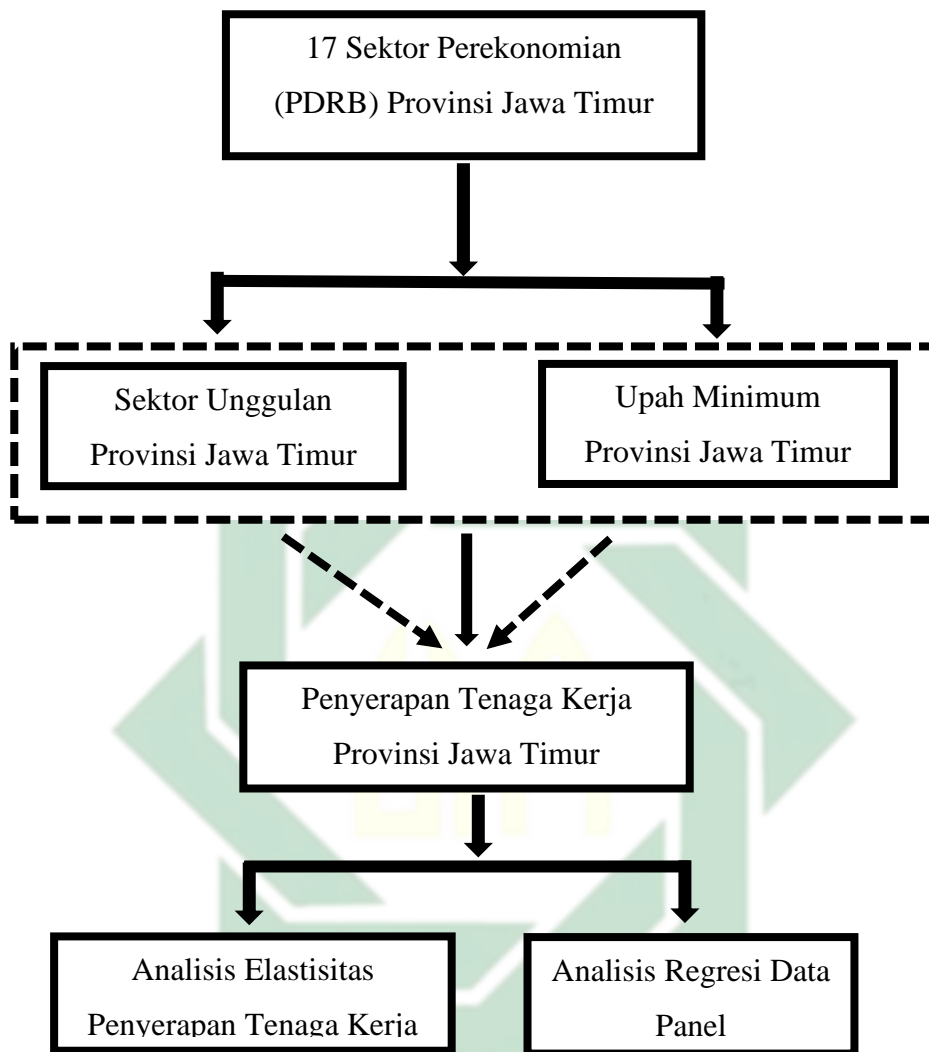
	Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Oleh: Anggraeny Hustia (2017)			sektor jasa-jasa. Perolehan analisis jalur memperlihatkan variabel sektor basis tidak berpengaruh signifikan atas penyerapan pekerja dengan nilai signifikansi sebesar 0,753. Sementara itu, besarnya pengaruh sektor basis atas penyerapan tenaga kerja yakni 16,6%. Sektor basis Kabupaten Batang Hari juga tidak berpengaruh signifikan atas pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,127 dengan besar pengaruhnya sebesar 69,3%.
8.	Analisis Sektor Basis Dalam Hubungannya dengan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Batang Hari Oleh: Syaiful, dkk (2014)	Penelitian Kepustakaan dengan Analisis Deskriptif	- Analisis Location Quotient - Analisis Dinamic Location Quotient - Analisis Korelasi Pearson	Perolehan pengujian LQ diketahui bahwasanya Kabupaten Batang Hari memperlihatkan 4 sektor basis ekonomi yakni sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan serts sektor jasa – jasa. Disisi lain, hanya ada 2 sektor basis yakni sektor jasa serta sektor perdagangan yang mempunyai korelasi besar atas keterserapan tenaga pekerja di Kabupaten Batang Hari.
9.	Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Analisis Coubb Douglas	Perolehan pengujian yang dilaksanakan memperlihatkan pertumbuhan PDRB riil dari tiap sektor mempunyai pengaruh positif serta

	Oleh: Rudi Hartono, Arfiah Busari, Muhammad Awaluddin (2018)			signifikan atas keterserapan pekerja serta penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, upah minimum mempunyai pengaruh positif serta tidak signifikan atas penyerapan pekerja di Kota Samarinda.
10.	Peran Sektor Basis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Utara Oleh: Oktavianus Katiandagho (2017)	Penelitian Kuantitatif Deskriptif	- Analisis Location Quotient - Analisis Penyerapan Tenaga Kerja	Perolehan pengujian LQ memperlihatkan sektor basis yakni sektor pertanian, sektor bangunan, juga sektor transportasi serta komunikasi. Sementara itu, untuk tingkat keterserapan tenaga pekerja tertinggi terjadi di sektor pertanian yakni > 30% diikuti dengan sektor konstruksi sebesar 8,45% dan sektor transportasi-komunikasi sebesar 8,34%. Sedangkan, untuk tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi yakni sektor transportasi-komunikasi sebesar 2,97%, sektor konstruksi sebesar 0,44% dan sektor pertanian sebesar 0,22%.

F. Kerangka Konseptual

Berlandaskan dari landasan teori serta sumber rujukan maka bisa dibuat suatu kerangka konseptual di mana pada penelitian menggunakan sektor unggulan dan upah minimum sebagai variabel bebas yang mempengaruhi keterserapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021. Pada alur penelitian langkah pertama yang dilakukan yakni menganalisis sektor unggulan yang ada di Provinsi Jawa Timur selama lima tahun dari tahun 2017-2021 dengan teknik analisa *Location Quotient* (LQ). Selanjutnya, setelah diketahui sektor ekonomi yang termasuk sektor unggulan maka dilakukan analisa elastisitas penyerapan tenaga kerja untuk mengetahui besarnya tingkat keterserapan tenaga kerja di sektor unggulan Provinsi Jawa Timur. Kemudian, langkah terakhir guna mengetahui pengaruh dari variabel sektor unggulan dan upah minimum terhadap keterserapan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 dilakukan dengan analisa regresi data panel, alur penelitian yakni sebagai berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 2.9 Kerangka Konseptual

Keterangan:

- = Pengaruh secara parsial
- - -→ = Pengaruh secara simultan

G. Pengembangan Hipotesis

Pada dasarnya hipotesis ialah anggapan yang mungkin benar dan sering dijadikan sebagai landasan dalam membuat keputusan, menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut ataupun menyelesaikan suatu permasalahan. Pengujian hipotesis ialah suatu prosedur yang memungkinkan suatu kesimpulan bisa ditolak ataupun diterimanya hipotesis yang saat ini dilaksanakan pengujian (Susanti, 2010). Selanjutnya, hipotesis bisa ditulis sebagai berikut:

H_1 = Sektor unggulan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

H_2 = Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif ialah pengujian yang dimaksudkan guna menjabarkan, memberikan penjelasan serta memaparkan kaitan dari variabel independen atas variabel dependen pada data. Sementara itu, penelitian dengan pendekatan kuantitatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada menguji suatu teori berdasarkan dari ukuran variabel penelitian berupa angka serta menganalisis data tersebut dengan tata cara statistik (Hidayat, 2019).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis ialah Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan rujukan pengumpulan data ialah dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur serta website instansi resmi lainnya. Sementara itu, rujukan yang lainnya menggunakan jurnal ilmiah maupun karya ilmiah lainnya yang terpublikasi. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2022 dengan penggunaan data dari tahun 2017-2021.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ialah total keseluruhan objek maupun subyek yang dipilih serta mempunyai karakter khusus yang kemudian oleh peneliti dipelajari untuk diambil suatu kesimpulan (Sugiyono, 2014). Populasi atas

penelitian ini digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum serta data total tenaga kerja Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, sampel penelitian ialah bagian karakter yang dipunyai oleh populasi yang digunakan sebagai perwakilan penelitian (Sugiyono, 2014). Penelitian menggunakan sampel yang terdiri dari 38 Kabupaten serta Kota di Jawa Timur tahun 2017-2021.

D. Variabel Penelitian

Variabel pengujian ialah keseluruhan nilai dari objek yang mempunyai variasi khusus yang sudah dipilih peneliti guna diteliti lebih lanjut yang selanjutnya diambil suatu simpulan (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini terdapat variabel bebas yakni variabel yang tidak terpengaruhi atas variabel lain (variabel X). Serta variabel terikat yakni variabel yang terpengaruhi atas adanya variabel lain (variabel Y). Variabel pada pengujian ini yakni:

- 1) Variabel X_1 = Sektor Unggulan PDRB Provinsi Jawa Timur
- 2) Variabel X_2 = Upah Minimum Provinsi Jawa Timur
- 3) Variabel Y = Jumlah tenaga kerja Provinsi Jawa Timur

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel pengujian yakni:

1. Sektor Unggulan

Sektor unggulan diartikan sebagai sektor yang mempunyai keunggulan komperatif serta keunggulan kompetitif atas produk sektor serupa atas wilayah lainnya yang juga bisa memberikan nilai guna lebih besar. Pada penelitian ini data sektor unggulan

digunakan berdasarkan dari data sektor unggulan 38 Kabupaten serta Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.

2. Upah Minimum

Upah minimum diartikan sebagai upah dengan standar minimum yang diberikan oleh perusahaan atau unit usaha kepada para pekerja, buruh ataupun pegawainya. Pada penelitian ini dipergunakan data upah minimum Provinsi Jawa Timur pada 38 kabupaten kota Tahun 2017-2021.

3. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja ialah keseluruhan total orang berusia kerja yang terlibat pada kegiatan perekonomian. Pada penelitian ini total pekerja digunakan data total tenaga pekerja terserap pada 38 kabupaten serta kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Sumber	Skala Pengukuran
Sektor Unggulan (X)	Publikasi BPS Provinsi Jawa Timur dengan data yang dipergunakan ialah sektor unggulan Kabupaten-Kota 2017-2021.	Milyar Rupiah
Upah Minimum	Publikasi BPS Provinsi Jawa Timur serta Dinas Ketenagakerjaan dengan data yang dipergunakan ialah upah minimum Kabupaten-Kota 2017-2021.	Juta Rupiah

Jumlah Tenaga Kerja (Y)	Publikasi BPS serta dinas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dengan data yang dipergunakan ialah data tenaga pekerja 38 Kabupaten-Kota Tahun 2017-2021	Perorang
-------------------------	---	----------

F. Jenis dan Sumber Data

Pengujian ini dipergunakan data sekunder yakni data panel gabungan atas *data time series* serta *cross section*. Data sekunder ialah data yang didapatkan secara tak langsung berupa penghimpunan data berdasarkan publikasi ataupun penelitian terdahulu. Penggunaan data pengujian ialah data sektor unggulan yang diperoleh dari melihat pertumbuhan PDRB, data upah minimum Provinsi Jawa Timur serta data jumlah tenaga kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021. Sedangkan, untuk sumber data diperoleh dari laman resmi instansi terkait dengan data penelitian yakni BPS dan dinas ketenagakerjaan Jawa Timur.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data yang dilaksanakan oleh peneliti ialah studi pustaka dengan memperoleh serta menganalisis data melalui publikasi resmi, jurnal rujukan serta buku-buku terkait yang sesuai dengan pengujian yang akan dilaksanakan peneliti. Penghimpunan data yang termaksud ialah melalui publikasi laman resmi BPS Jawa Timur, Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur serta publikasi jurnal yang terkait.

H. Teknik Analisis Data

Pengujian memakai teknik analisa *Location Quotient* (LQ), regresi data panel serta analisa elastisitas penyerapan tenaga pekerja.

1. Analisa *Location Quotient* (LQ)

Analisa LQ dimanfaatkan guna mencari tahu sektor ekonomi yang termasuk pada basis sektor atau sektor unggulan serta sektor non unggulan. Analisa LQ biasanya dipergunakan sebagai parameter pertumbuhan suatu wilayah seperti kesempatan tenaga pekerja serta pertumbuhan ekonomi atas PDRB suatu wilayah (Adisasmita, 2018). Analisa LQ dilaksanakan dengan memperbandingkan antara proporsi dari jumlah pekerja sektor tertentu seperti sektor industri atau jumlah nilai dari PDRB suatu Kabupaten-Kota yang diperbandingkan dengan proporsi dari pekerja ataupun sektor yang sama tingkat Provinsi. Adapun Formulasi rumusnya yakni:

$$\text{Rumus LQ} = \frac{SE_{sub}/PDRB_{sub}}{(SE_{glob}/PDRB_{glob})}$$

Keterangan untuk rumus SLQ adalah

- a) LQsub = Indeks atau nilai LQ pada sektor perekonomian
- b) SEsub = Nilai sektoral ekonomi (i) pada PDRB Kota terkait
- c) PDRBsub = Nilai keseluruhan PDRB daerah Kota terkait
- d) SEglob = Nilai sektoral perekonomian (i) PDRB Propinsi terkait
- e) PDRBglob = Nilai keseluruhan PDRB Propinsi terkait

Merujuk pada formulasi diatas bisa disimpulkan terkait kriteria penilaian atas suatu sektor basis atau unggulan yakni:

- 1) Nilai $LQ > 1$ berarti merupakan sektor basis atau unggulan di mana sektor tersebut mempunyai laju pertumbuhan lebih tinggi dari sektor sama pada Provinsi.
- 2) Nilai $LQ < 1$ berarti sektor termasuk sektor non-basis atau sektor non-unggulan yang mempunyai laju pertumbuhan lebih rendah dari sektor sama pada Provinsi.
- 3) Nilai $LQ = 1$ berarti laju pertumbuhan sektor tersebut sama seperti sektor pada Provinsi (Adisasmita, 2018).

2. Regresi Data Panel

Pengujian memakai yang memadukan data *cross section* yang dipergunakan guna mencari tahu gambaran antar *variabel independen* yang mempengaruhi *variabel dependen*. Persamaan regresi yakni:

$$Y_{TenagaKerja} = a + \beta^1 X^1 + \beta^2 X^2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Tenaga kerja
- a = Koefisien konstanta
- β_1 = Koefisien regresi sektor unggulan
- β_2 = Koefisien regresi upah minimum
- ε = Tingkat kesalahan (error)

Pada analisis regresi data panel ada berbagai model yang yang bisa dipergunakan yakni model *OLS pooled*, *model fixed effect last square dummy variabel (LSDV)*, *model fixed effect within-group*, *model random effect* (Gujarati & Porter, 2010). Pengujian data panel mempunyai bermacam model pengujian, yakni:

a. *Common Effect Model*

Biasanya dikenal sebagai *pooled least square* yakni suatu metode di mana ketika melaksanakan pengamatan data mengalami regresi yang menghasilkan data berubah berdimensi tunggal. Diasumsikan jika hasil intersep tiap variabel yakni sama dengan slope koefisiennya. Model ini bisa membiaskan uraian asli dari kaitan antar variabel dependen serta variabel independen tiap anggota *cross section* (Astuti, 2010).

b. *Fixed Effect Model*

Biasanya dikenal sebagai *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* yakni satu teknik pengujian data panel dengan menggunakan *dummy variabel* guna mendapati perbedaan intersep (Ansofino et al., 2016).

c. *Random Effect Model*

Adanya *dummy variabel* pada *fixed effect* digunakan untuk ketidaktahuan penguji atas model sesungguhnya. Namun, pemodelan ini menyebabkan efek berkurangnya derajat kebebasan sehingga berdampak pada menurunnya parameter. Guna menyelesaikan masalah tersebut dipergunakan variabel pengganggu seperti *random*

effect model. Model ini ialah perkiraan dari data panel dengan variabel pengganggu yang memiliki kaitan antar waktu serta individu (Ansofino *et al.*, 2016).

Sementara itu, guna memilih model terbaik bisa dilaksanakan uji spesifikasi model, yakni:

1. Uji Spesifikasi Model

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* dipergunakan guna memilih model yang tepat antar model *fixed effect* ataupun model *common effect*. Ketika uji spesifikasi model diperoleh *probabilly chi-square* diatas 0,05 model yang akurat dipergunakan ialah *common effect*. Akan tetapi, ketika *probabilly chi-square* dibawah 0,05 model yang akurat ialah *fixed effect*.

b. Uji *Hausman*

Uji *hausman* dipergunakan guna menentukan model antara *fixed effect model* (FEM) ataupun *random effect model* (REM).

Disebabkan pada model FEM tiap objek mempunyai intersep berlainan akan tetapi tiap-tiap intersep tidak bisa berganti seiring waktu yang dikenal sebagai *time-invariant*. Sementara itu, pada REM intersepanya secara sama-sama mewakilkan nilai rata-rata tersebut (Gujarati & Porter, 2010).

$H_0 = \text{Random Effect Model}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model}$

Apabila hipotesis ditolak H_0 dengan hasil probabilitas $< \alpha$ (0,05), bisa disimpulkan model yang digunakan ialah FEM. Akan tetapi ketika H_a ditolak, disimpulkan model yang tepat ialah menggunakan REM.

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji LM dipergunakan guna memilih model terbaik antar model CEM maupun model REM. Uji LM dipergunakan Breusch-Pagan yang sering dipergunakan oleh pengujian saat pengujian LM. Hipotesis dipergunakan yakni:

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_a = \text{Random Effect Model}$

Ketika hasil *Cross-Section* Breusch-Pagan $< \alpha$ (0,05), berarti H_0 tertolak serta memakai *Random Effect Model*. Sementara, ketika hasil *Cross-Section* Breusch-Pagan $> \alpha$ (0,05), diterima H_0 serta memakai *Common Effect Model* atas pengujian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik secara statistik harus dilaksanakan guna bisa melanjutkan suatu analisis regresi. Persamaan yang terpenuhi asumsi klasik ialah metode *Generalized Least Square (GLS)* (Gujarati & Porter, 2010). Pada *software Eviews* model pengestimasi GLS ialah *random effect model*, sementara *fixed effect model* digunakan *Ordinary*

Least Square (OLS). Saat pemilihan model pengestimasi pada persamaan regresi terpilih *random effect model*, maka tidak usah dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yakni:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dipergunakan guna mencari tahu apakah variabel berdistribusi normal ataupun tidak. Jika data tidak bisa memenuhi asumsi normalitas, akan berakibat pada ketidakvalidan uji statistik pada sampel dengan jumlah kecil. Guna mencari tahu data terdistribusi normal ataupun tidak bisa ditinjau atas nilai signifikannya, data berdistribusi normal ketika nilainya lebih dari 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dipergunakan guna mencari tahu apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Guna mencari tahu ada tidaknya multikolinearitas ataupun tidak yakni meninjau nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Ketika nilai VIF dibawah 0,8 maka data bebas adanya multikolinier.

3) Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dipergunakan guna mencari tahu apakah pada data analisis regresi muncul gangguan berupa varians yang sama (homokedastisitas) atau berbeda (heterokedastisitas). Model terbaik pada analisis regresi ialah

data yang memiliki sifat homokedastisitas. Ketika hasil probabilitinya lebih dari 0,05 artinya bebas dari permasalahan heterokedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dipergunakan guna mencari tahu apakah pada data didapati korelasi antar data pengamatan yang ditunjukkan berdasarkan waktu (*time series*) ataupun ruang (*cross section*). Ketika nilai *probability* lebih besar dari 0,05 artinya tak dijumpai masalah autokorelasi pada model regresi.

3. Uji Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis yang dipergunakan ialah uji T atau pengujian parsial. Pengujian parsial digunakan guna mencari tahu kaitan dari variabel bebas (X) atas variabel terikat (Y) secara sendiri-sendiri. Dalam pengujian digunakan tingkat signifikasin 0,05 dengan membuat hipotesis yakni:

- 1) $H_0 = 0$, menunjukkan tidak terdapat kaitan signifikan antara variabel bebas (X) atas variabel terikat (Y).
- 2) $H_a \neq 0$, menunjukkan terdapat kaitan signifikan antara variabel bebas (X) atas variabel terikat (Y).

Nilai pada uji T jika nilai prob. $T \leq \alpha$ (0,05) artinya ditolak H_0 serta menerima H_a , begitupun ketika nilai prob. $T > \alpha$ (0,05) artinya ditolak H_a serta menerima H_0 .

4. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dipergunakan jika pengujian memiliki dua atau lebih variabel *dependent* (bebas) sebab pengujian ini dipergunakan untuk mencari tahu kaitan atas semua variabel bebas terhadap variabel *dependent* (terikat). Pada pengujian ini dalam mencari tahu pengaruhnya ialah membandingkan nilai probabiliti F dengan nilai alpha (α) yakni 0,05. Ketika nilai probabiliti F nya lebih besar dari 0,05 maka akan menolak H_a serta menerima H_0 . Namun, jika nilai probabiliti F lebih kecil dari nilai 0,05 maka akan menerima H_a serta menolak H_0 yang berarti secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

5. Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi R^2 ialah parameter ringkas yang memperlihatkan seberapa bagus garis regresi dari sampel. Koefisien R^2 dipergunakan untuk memperlihatkan kekuatan model regresi dalam memberikan penjelasan variasi dari variabel dependen. Hasil koefisien R^2 yakni satu atau nol, kian tinggi hasil R^2 artinya kian tinggi peran variabel dalam penjelasan variabel dependen. Ketika nilai R^2 ialah satu maka kesesuaian modelnya akurat serta ditegaskan variabel independen yakni sektor unggulan serta upah minimum mempunyai kaitan dengan variabel dependen yakni ketersediaan tenaga kerja, begitupun sebaliknya ketika nilai R^2 sama dengan nol

menunjukkan variabel independen tak mempunyai kaitan dengan variabel dependen. Uji koefisien R^2 pada penelitian dipergunakan guna mencari tahu seberapa besar total tenaga pekerja terserap pada sektor unggulan Provinsi Jawa Timur.

3. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Guna mencari tahu seberapa besar penyerapan pekerja pada sektor unggulan selain mempergunakan analisa regresi data panel juga dipergunakan analisa elastisitas penyerapan tenaga pekerja. Kaitan antara laju pertumbuhan ekonomi serta laju pertumbuhan penyerapan tenaga pekerja bisa dijabarkan dengan elastisitas kesempatan tenaga pekerja. Apabila elastisitas kesempatan pekerja tinggi perolehannya, maka tiap laju pertumbuhan ekonomi bisa membuka adanya penyerapan kerja lebih banyak (Aryanti *et al.*, 2019). Elastisitas penyerapan tenaga pekerja bisa diketahui yakni:

$$\text{Elastisitas } PTK = \frac{\% \text{ Laju Pertumbuhan Jumlah Tenaga Pekerja}}{\% \text{ Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)}}$$

Kriteria dari elastisitas kesempatan kerja pada hubungannya terkait dengan kekuatannya pada penyerapan tenaga pekerja bisa dijabarkan dengan kriteria yakni:

- a) Hasil $E = 1$ yakni elastisitas uniter yang memperlihatkan kekuatan dari sektor-sektor ekonomi guna menyerap pekerja, ketika total sektor unggulan meningkat 1% akan menyerap jumlah pekerja sebesar 1%, sebaliknya ketika

total sektor unggulan turun sebesar 1% maka akan menurunkan penyerapan pekerja sebesar 1%.

b) Hasil $E > 1$ yakni elastis yang memperlihatkan kekuatan dari sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga pekerja. Ketika total sektor unggulan meningkat 1% berarti jumlah pekerja terserap akan meningkat lebih banyak dari 1%, namun saat total sektor unggulan menurun lebih banyak dari 1%.

c) Hasil $E < 1$ yakni inelastis yang memperlihatkan kekuatan dari sektor-sektor ekonomi dalam menyerap pekerja, ketika total sektor unggulan meningkat sebesar 1% akan menyerap pekerja kurang dari 1%, serta ketika total sektor unggulan menurun sebesar 1% akan menurunkan total pekerja terserap kurang dari 1%.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah paling besar. Provinsi Jawa Timur berdasar geografisnya berada di koordinat 111,0” – 114,4” Bujur Timur serta 7,12” – 8,48” Lintang Selatan. Luas Wilayah Provinsi Jawa Timur yakni 47.803,49 km² di mana Provinsi Jawa Timur dibagi atas dua bagian utama yakni Jawa Timur daratan dengan luas 42.541 km² serta Kepulauan Madura seluas 5.422 km² (BPS Provinsi Jawa Timur, 2021).

Berdasarkan fisiografinya Provinsi Jawa Timur terbagi atas beberapa zona. Dataran rendah serta dataran tinggi berada di tengah yakni kota Malang dan sekitarnya ialah wilayah yang tanahnya cukup subur digunakan untuk pertanian, wilayah bagian utara dikenal wilayah pegunungan tandus yakni kabupaten Bojonegoro serta sekitarnya, lalu wilayah selatan yang merupakan wilayah perbukitan dan pesisir pantai selatan yakni kabupaten Pacitan serta sekitarnya (BPS Provinsi Jawa Timur, 2021). Provinsi Jawa Timur memiliki batasan wilayah yakni:

- a. Bagian Utara : Laut Jawa
- b. Bagian Timur : Selat Bali (Provinsi Bali)
- c. Bagian Selatan : Samudera Hindia
- d. Bagian Barat : Provinsi Jawa Tengah

2. Wilayah Administratif dan Demografis

Secara Administratifnya Provinsi Jawa Timur terbagi atas 38 kabupaten/kota yang terbagi ke dalam 29 kabupaten dan 9 kota serta membuat Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi yang memiliki Kabupaten/Kota terbanyak. Ibu Kota Provinsi Jawa Timur berada di kota Surabaya. Menurut luas wilayah kabupaten Sidoarjo ialah kabupaten dengan luas wilayah terkecil yakni 634,38 km², sementara itu untuk kabupaten dengan wilayah terluas yakni kabupaten Banyuwangi yakni 5.782,50 km². Untuk wilayah kota terluas yakni di kota Surabaya dengan luas 350,54 km² serta kota terkecil yakni kota Mojokerto seluas 20,21 km².

Provinsi Jawa Timur tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan pada total penduduknya. Data publikasi BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan kenaikan selama lima tahun terakhir, pada tahun 2017 sebanyak 39.292.971 jiwa, Tahun 2018 sebanyak 39.500.851 jiwa, tahun 2019 sebanyak 39.698.631 jiwa, lalu tahun 2020 sebanyak 40.665.696 jiwa serta tahun 2021 menjadi 40.878.789 jiwa. Pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur memiliki total penduduk sebesar 40.878.789 jiwa yang menyebar di 38 kabupaten kota. Kabupaten dengan total penduduk sedikit ialah kabupaten Pacitan dengan total keseluruhan penduduknya sebanyak 589.108 jiwa, sementara itu kabupaten dengan total keseluruhan penduduk terbesar ialah kabupaten Malang sebanyak 2.668.296 jiwa. Disisi lain, kota dengan total keseluruhan penduduk paling sedikit yakni kota Mojokerto sebanyak

133.272 jiwa serta kota dengan total keseluruhan penduduk terbesar ialah kota Surabaya sebanyak 2.880.284 jiwa (BPS Jawa Timur, 2022).

3. Ketenagakerjaan

Provinsi Jawa Timur berdasarkan total tenaga kerja tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 berdasarkan dari publikasi BPS menunjukkan jika kondisi angkatan kerja Provinsi Jawa Timur yakni terkait total angkatan kerja sebesar 22.319.145 jiwa yang terdiri dari total orang bekerja terserap sebanyak 21.037.750 jiwa serta total pengangguran terbuka yakni 1.281.395 jiwa. Pada tahun 2021 total orang bekerja terbanyak berada di kabupaten Malang yakni 1.3553.449 jiwa, sementara itu untuk total pengangguran terbuka paling banyak ialah kabupaten Sidoarjo sebanyak 130.979 jiwa. Di sisi lain, kota dengan jumlah total orang bekerja terserap terbanyak ialah kota Surabaya sebanyak 1.420.615 jiwa dengan diikuti total pengangguran terbuka yakni 152.273 jiwa. Berdasarkan angkatan kerja tersebut, diketahui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebanyak 70%.

Kondisi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur selama lima tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan terkait total pekerja terserap. Akan tetapi, dari kenaikan total pekerja terserap tersebut juga diikuti dengan total pengangguran yang juga kian meninggi. Tercatat pada tahun 2017 total pekerja yakni 20.099.220 jiwa, tahun 2018 yakni 20.449.949 jiwa, tahun 2019 naik menjadi 21.032.612 jiwa, akan tetapi tahun 2020

mengalami penurunan menjadi 20.962.967 jiwa, serta naik kembali menjadi 21.037.750 jiwa. Sedangkan, untuk total pengangguran pada tahun 2017 yakni 838.496 jiwa, tahun 2018 meningkat menjadi 850.474 jiwa, tahun 2019 menurun yakni 835.130 jiwa, tahun 2020 meningkat kembali yakni 1.301.145 jiwa serta tahun 2021 menurun menjadi 1.281.395 jiwa.

Keseluruhan total tenaga pekerja Provinsi Jawa Timur tersebar di tujuh belas (17) sektor ekonomi dengan dominasi paling banyak di sektor pertanian, diikuti dengan sektor perdagangan serta sektor industri pengolahan. Tahun 2021 tercatat jika pekerja terserap pada sektor pertanian sebanyak 6.663.979 jiwa atau sekitar 31,68% total pekerja, kemudian sektor perdagangan yakni 3.997.575 jiwa atau sekitar 19,00% total pekerja, serta sektor industri pengolahan sebanyak 3.181.246 jiwa atau sekitar 15,52% total pekerja (BPS Jawa Timur, 2022). Berdasarkan data kondisi angkatan pekerja Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2021 bisa diketahui yakni:

Tabel 4.1 Total Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

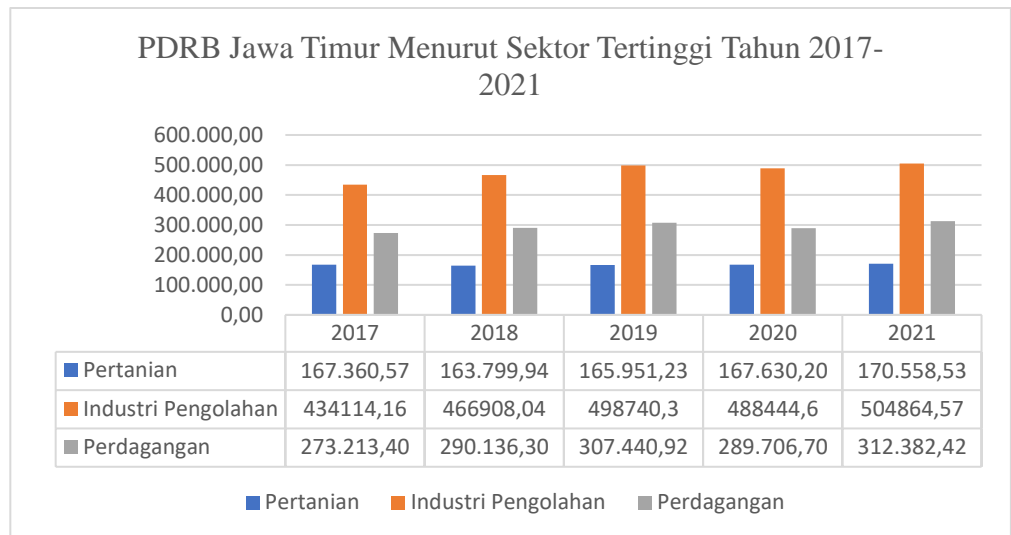
Tahun	Total Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
2017	20.937.716	20.099.220	838.496	68,78
2018	21.300.423	20.449.949	850.474	69,37
2019	21.867.742	21.032.612	835.130	69,61
2020	22.264.112	20.962.967	1.301.145	70,33
2021	22.319.145	21.037.750	1.281.395	70,00

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Guna menghitung perekonomian atas suatu wilayah bisa dipergunakan besaran dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Azis & Ahsan, 2018). Guna melihat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Timur meninjau melalui PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB memperlihatkan nilai tambah barang serta jasa yang terpengaruhi perubahan harga serta dalam perhitungannya terdapat besaran dari inflasi. Sementara itu, PDRB ADHK memperlihatkan total nilai tambah barang serta jasa tanpa melihat perubahan harga dari tahun ke tahun sehingga tidak terkandung besaran inflasi. Perekonomian Jawa Timur berdasarkan pada data menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2017 yakni 5,46%, tahun 2018-2019 yakni 5,47% dan 5,53%, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -2,33% dan pada tahun 2021 meningkat kembali yakni 3,57%. Sementara itu, total nilai PDRB ADHK Jawa Timur juga terus tumbuh dari tahun ke tahun tahun 2017 sebesar 1.482.299 miliar, tahun 2018 yakni 1.563.441 miliar, tahun 2019 yakni 1.649.895 miliar, tahun 2020 menurun menjadi 1.611.507 miliar, serta tahun 2021 meningkat menjadi 1.669.116 miliar. Dari nilai PDRB tersebut perekonomian Jawa Timur di Dominasi oleh sektor pertanian, sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Gambar 4.1 PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Sektor Tertinggi Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 4.1 diketahui jika total PDRB tertinggi yakni sektor industri pengolahan. Di Jawa Timur sendiri industri pengolahan di tahun 2021 masih menjadi penyokong utama perekonomian yang mampu berkontribusi sebanyak 30,72%. Selanjutnya, diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai penopang perekonomian di tahun 2021 mampu berkontribusi sebanyak 18,46%. Sektor terakhir yang menyokong perekonomian Jawa Timur ialah sektor pertanian dengan kontribusi sebanyak 11,50%. Sebagai salah satu Provinsi pendorong swasembada pangan, pemerintah terus berupaya guna meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Jawa Timur.

5. Kebijakan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur

Ditetapkannya kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan guna mewujudkan upah yang realistis berdasar dari lokasi daerah ataupun keinginan dari dua belah pihak yang terkait yakni pengusaha dan pekerja. Ketetapan upah minimum di Provinsi Jawa Timur setiap tahun sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan perolehan sidang dewan pengupahan Provinsi (Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, 2021). Peningkatan upah minimum yang ditetapkan pasti diupayakan untuk tidak berada dibawah daya beli masyarakat yang kemudian tidak akan menurunkan tingkat permintaan masyarakat atas suatu produk dalam suatu wilayah.

Hingga tahun 2023 upah minimum Provinsi Jawa Timur terus meningkat. Pada tahun 2021 upah minimum sebesar Rp. 1.868.777 di mana angka ini naik sebesar Rp. 100.000 atau tumbuh 5,5% dari upah minimum tahun 2020 yakni Rp. 1.768.777. Selanjutnya, ditahun 2022, upah minimum Jawa Timur meningkat kembali menjadi Rp. 1.891.567 yang naik sebesar Rp. 22.790 atau tumbuh sebesar 1,22%. Selanjutnya, di tahun 2023 upah minimum Provinsi Jawa Timur kembali meningkat menjadi Rp. 2.040.244 yang meningkat lebih banyak yakni sebesar Rp. 148.677 atau tumbuh sebesar 7,8% (Setyaningrum, 2022).

B. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan mempergunakan teknik analisa *Location Quotient* (LQ) guna diketahuinya sektor unggulan Provinsi Jawa Timur, program *Eviews* 12 guna mengetahui pengaruh dari variabel sektor unggulan dan upah minimum atas keterserapan tenaga pekerja serta analisa elastisitas penyerapan pekerja guna mengetahui besaran keterserapan pekerja di Provinsi Jawa Timur. Pada program *Eviews*, penganalisisan data dilakukan yakni regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis statistik, serta uji koefisien determinasi R^2 . Data yang telah dihimpun ialah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur serta data Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur dari tahun 2017-2021.

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) pada pengujian ini dipergunakan untuk menentukan sektor ekonomi yang tergolong pada sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur. Perolehan nilai LQ digunakan untuk menentukan sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lain yang nantinya akan membawa dampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Analisis LQ dilaksanakan dengan memperbandingkan nilai sektor lapangan usaha PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur dengan nilai sektor lapangan usaha PDB ADHK Indonesia yang sama selama tahun pengujian yakni dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Pada analisa LQ terdapat tiga parameter yakni nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut digolongkan sebagai sektor unggulan dengan artian bahwa sektor tersebut memiliki tingkat spesialisasi Provinsi lebih besar dari tingkat nasional serta tingkat produksi sektor bersangkutan telah melampaui kebutuhan permintaan di wilayah di mana sektor tersebut dihasilkan dan selanjutnya kelebihan produksi sektor tersebut di ekspor ke wilayah lain. Apabila nilai $LQ < 1$ maka sektor tersebut dikatakan sektor non unggulan dengan artian bahwa sektor tersebut mempunyai tingkat spesialisasi Provinsi lebih rendah dari tingkat nasional serta pemenuhan dari permintaan sektor tersebut perlu didatangkan dari wilayah lainnya. Sementara itu, nilai $LQ = 1$ berarti tingkat spesialisasi dari sektor bersangkutan di Provinsi sama dengan tingkat spesialisasi secara nasional. Tingkat produksi sektor tersebut hanya memenuhi permintaan atau kebutuhan di wilayah lingkup Provinsi tersebut.

Berdasarkan analisis LQ yang dilakukan pada tujuh belas sektor ekonomi Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan, memperlihatkan jika dari ketujuh belas sektor ekonomi hanya ada sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan dengan nilai LQ lebih dari satu. Guna melihat hasil perolahan LQ Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 bisa dilihat melalui tabel 4.2

**Tabel 4.2 Hasil Perolehan LQ Provinsi Jawa Timur Tahun
2017-2021**

Sektor	Tahun					Rata-Rata	Ket
	2017	2018	2019	2020	2021		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,86	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79	non unggulan
Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,66	0,66	0,66	0,60	0,65	non unggulan
Industri Pengolahan	1,33	1,39	1,39	1,42	1,41	1,39	unggulan
Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	non unggulan
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	1,17	1,12	1,12	1,13	1,13	1,14	unggulan
Konstruksi	0,89	0,88	0,88	0,89	0,88	0,88	non unggulan
Perdagangan Besar dan Eceran	1,34	1,36	1,36	1,34	1,38	1,35	unggulan
Transportasi dan Pergudangan	0,69	0,67	0,67	0,71	0,70	0,69	non unggulan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,71	1,75	1,75	1,79	1,77	1,75	unggulan
Informasi dan Komunikasi	1,08	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	unggulan
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,61	0,59	0,59	0,58	0,58	0,59	non unggulan
Real Estate	0,56	0,57	0,57	0,58	0,58	0,57	non unggulan
Jasa Perusahaan	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	non unggulan
Administrasi Pemerintah	0,64	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	non unggulan
Jasa Pendidikan	0,82	0,82	0,82	0,84	0,84	0,83	non unggulan
Jasa Kesehatan	0,57	0,56	0,56	0,55	0,52	0,55	non unggulan
Jasa Lainnya	0,80	0,73	0,73	0,66	0,69	0,72	non unggulan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Pada tabel 4.2 diketahui jika sektor unggulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 terdapat lima sektor yakni sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air dan pengelolaan limbah, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum serta sektor informasi dan komunikasi.

Sementara itu, sektor non unggulan Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 yakni sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan serta sektor jasa lainnya.

Hasil analisis LQ sesuai dengan perolehan pengujian dari Fahrizal Taufiqurrahman yang menyebutkan jika sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2017 hingga tahun 2021 yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (Taufiqurrachman, 2022). Perolehan pengujian sektor unggulan juga dikuatkan dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Nurul Assidikiyah yakni sebelum dan sesudah pandemi diketahui jika sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur ialah sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi makan minum dan sektor informasi (Assidikiyah *et al.*, 2021). Perolehan pengujian juga didukung dengan laju pertumbuhan kelima sektor selama lima tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2021, yakni pada sektor industri

pengolahan tumbuh sebesar 6%, sektor pengadaan air yang tumbuh sebesar 5%, sektor tumbuh sebesar 5%, sektor penyediaan makan dan minum dengan pertumbuhan paling tinggi selama lima tahun yakni 7% serta sektor informasi yang terus tumbuh sebesar 6% (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022).

2. Regresi Data Panel

Guna mencari tahu pengaruh dari sektor unggulan dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 dilaksanakan dengan mempergunakan analisa regresi data panel dengan bantuan program *Eviews* 12 dengan data dari 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur

a. Model Common Effect

Common Effect Model (CEM) ialah pengujian regresi data panel di mana saat dilakukannya pengamatan model ini memiliki regresi yang menyebabkan data berubah menjadi dimensi tunggal. Hasil pengujian dengan CEM dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji Model Common Effect

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	117753.8	1.573.124	0.1175
X1	0.001137	0.899008	0.3699
X2	0.183641	5.043.169	0.0000

Sumber: Hasil Output *Eviews* 12

b. *Model Fixed Effect*

Fixed Effect Model (FEM) ialah model pengujian regresi data panel yang memanfaatkan *dummy variabel* guna menemukan adanya perbedaan intersep. Hasil pengujian model FEM bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Model Fixed Effect

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	471440.2	3.871.884	0.0000
X1	-5.20E-05	-0.206059	0.8370
X2	0.035615	6.943.340	0.0000

Sumber: Hasil Output *Eviews* 12

c. *Model Random Effect*

Model Random Effect (REM) ialah pengujian regresi data panel di mana variabel gangguan bisa saling memiliki kaitan berupa setiap waktu dan individu. Hasil pengujian REM bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Model Random Effect

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	471440.2	3.871.884	0.0000
X1	-5.20E-05	-0.206059	0.8370
X2	0.035615	6.943.340	0.0000

Sumber: Hasil Ouput *Eviews* 12

3. Hasil Uji Spesifikasi

a. Uji Chow

Uji pertama yang dilaksanakan pada uji spesifikasi model regresi data panel yakni uji chow dengan mempergunakan efek spesifikasi yakni *fixed effect model*. Hal ini dipergunakan untuk memahami model terbaik mana yang layak digunakan dari *fixed effect* atau *common effect*. Ketika hasil *probabiliti chi-square* lebih kecil dari taraf signifikasi (α) yakni 0,05 maka menolak H_0 dan menerima H_a serta model yang layak dipergunakan yakni *fixed effect model*. Akan tetapi, ketika nilai *probabiliti chi-square* lebih besar dari taraf signifikasi (α) yakni 0,05 maka menerima H_a dan menolak H_0 serta model yang layak dipergunakan yakni *common effect model*.

Keterangan:

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1557.589930	(36,143)	0.0000
Cross-section Chi-square	1087.289164	36	0.0000

Sumber: Hasil Output *Eviews 12*

Berdasarkan perolehan uji *chow* yang dilakukan menghasilkan nilai *chi-square* yakni 0.0000. Hal ini menandakan jika nilai *chi-square* lebih kecil dari 0,05 sehingga menerima H_a serta menunjukkan jika model yang layak dipergunakan yakni *fixed effect model*.

b. Uji *Hausman*

Uji selanjutnya dalam uji spesifikasi model data panel yakni uji *hausman*. Uji *hausman* dilaksanakan guna mencari tahu mana yang layak dipergunakan dari *random effect model* atau *fixed effect model*. Ketika hasil *probabiliti chi-square* lebih kecil dari taraf signifikasi (α) yakni 0,05 maka menolak H_0 dan menerima H_a serta model yang layak dipergunakan yakni *fixed effect model*. Namun, ketika nilai *probability chi-square* lebih besar dari taraf signifikasi (α) yakni 0,05 maka menerima H_0 dan menolak H_a serta model yang layak dipergunakan yakni *random effect model*.

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Tabel 4.7 Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.640312	2	0.0361

Sumber: Hasil Output *Eviews 12*

Berdasarkan perolehan uji *hausman* yang dilaksanakan menunjukkan hasil *probabiliti cross-section random* yakni 0,0361. Hal ini menunjukkan jika nilai *probabiliti* lebih kecil dari 0,05 serta menerima H_a sehingga model yang layak dipergunakan yakni *fixed effect model*. Karena pada dua uji spesifikasi model yang dipergunakan menghasilkan model yang layak digunakan yakni *fixed effect model* maka uji *Langrange Multiplier* (LM) tidak perlu dilakukan.

4. Hasil Keputusan Model

Sesuai dengan pengujian model dalam data panel seperti *common effect*, *fixed effect* serta *random effect* maka selanjutnya dilaksanakan uji spesifikais model guna menentukan model yang layak dan akan digunakan dari ketiga model tersebut. Berdasarkan dari hasil uji spesifikasi model yang dilakukan dengan menggunakan program *Eviews* 12 yakni *uji chow* dengan hasil *probabiliti chi-square* yakni 0,000 dan uji *hausman* dengan hasil *probabiliti cross-section random* yakni 0,0361 maka diambil kepuusan model yang layak digunakan ialah *fixed effect model*.

5. Analisis Statistik Deskriptif

Sesuai dengan pengujian pada analisis regresi data panel yang dilakukan oleh peneliti, maka model yang layak dipergunakan pada penelitian yakni *fixed effect model* dengan persamaan regresi yakni

$$Y = 471440,2 - 5,20E05X_1 + 0,035615X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- a. Nilai koefisien konstanta sebesar 471440,2. Hal ini memperlihatkan jika variabel bebas yakni sektor unggulan dan upah minimum adalah 0 maka keterserapan tenaga kerja sebesar 471440,2.
- b. Nilai koefisien β_1 (sektor unggulan) sebesar -5,20E05. Hal ini memperlihatkan jika pertumbuhan sektor unggulan meningkat sebanyak 1% akan menurunkan jumlah keterserapan pekerja sebesar

5%. Arah hubungan negatif memperlihatkan jika pertumbuhan ekonomi dari sektor unggulan akan menurunkan keterserapan tenaga kerja.

- c. Nilai koefisien β_2 (upah minimum) sebesar 0,035615. Perolehan tersebut memperlihatkan jika upah minimum meningkat sebanyak 1% maka akan menaikkan keterserapan pekerja sebesar 0,03%. Arah hubungan positif memperlihatkan semakin meningkat upah minimum yang ditetapkan maka keterserapan pekerja juga ikut meningkat.

6. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipergunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi data panel berdistribusi normal atau tidak dengan melihat hasil dari *probability Jarque-Bera* (JB). Pada dasarnya pengujian normalitas bukan merupakan syarat adanya BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) serta terdapat beberapa pendapat yang tidak mewajibkan adanya syarat ini sebagai sesuatu yang harus terpenuhi (Nachrowi & Usman, 2006).

Berdasarkan pada hasil pengujian normalitas diketahui jika hasil *Jarque-Bera* yakni 9.189289 dengan hasil *probabiliti* 0,010106 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05 sehingga pada penelitian yang dilakukan ialah data tidak terdistribusi normal.

Uji normalitas pada pengujian statistik hanya dilakukan ketika jumlah pengamatan ialah kurang dari 30 hal ini dilaksanakan guna mencari tahu apakah eror term mendekati distribusi normal. Sementara itu, ketika jumlah data pengamatan lebih dari 30, maka tidak perlu dilaksanakan pengujian normalitas (Ajija, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipergunakan untuk mencari tahu apakah pada model regresi tiap variabel bebas mempunyai korelasi atau tidak. Ketika koefisien tiap variabel bebas menghasilkan nilai lebih besar dari 0,8 maka pada model pengujian didapati masalah multikolinearitas. Akan tetapi, ketika nilai koefisien tiap variabel bebas lebih kecil dari 0,8 maka pada pengujian model tidak didapati masalah multikolinearitas (Gujarati & Porter, 2010). Hasil pengujian uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan perolehan pengujian multikolinearitas memperlihatkan jika hasil koefisien masing-masing variabel bebas sektor unggulan (X1) dan upah minimum (X2) yakni 0,555642 dan 0,555642 yang berarti lebih kecil dari 0,8 sehingga variabel bebas pada pengujian ini tidak didapati masalah multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan guna mencari tahu apakah pada pengujian model regresi muncul gangguan berupa varians yang sama (homokedastisitas) atau berbeda (heterokedastisitas). Hasil pengujian heteroskedastisitas bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.018498	0.010055	1.839.724	0.0679
X1	-1.65E-10	2.09E-10	-0.789745	0.4310
X2	1.75E-09	4.24E-09	0.412508	0.6806

Sumber: Hasil Output *Eviews 12*

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas memperlihatkan hasil *resabs* pada probabilitas tiap variabel yakni 0,0679, 0,4310, dan 0,6806. Hasil *resabs probablity* tersebut memperlihatkan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga pada pengujian model regresi tidak didapati permasalahan heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dipergunakan untuk mencari tahu sebuah model regresi apakah didapati korelasi antar data pengamatan yang diperlihatkan berdasarkan waktu ataupun ruang.

Keterangan:

Nilai n : 190

Nilai k : 2

Nilai dL : 1,7420
Nilai dU : 1,7838
Nilai DW Stat : 2,032844

Berdasarkan perolehan pengujian autokorelasi dengan model *fixed effect* memperlihatkan bahwa nilai *Durbin-Watson Stat* sebesar 2,032844. Nilai DW sebesar 2,032844 lebih besar dari nilai dU yakni 1,7828 serta nilai (4-DW) sebesar 1,967156 yang lebih besar dari nilai dU yakni 1,7828. Hal ini memperlihatkan jika pada pengujian data regresi tidak didapati masalah autokorelasi.

7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial dipergunakan untuk mencari tahu pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Perolehan pengujian uji parsial (Uji T) ialah sebagai berikut:

a. Sektor Unggulan (X1)

Berdasarkan perolehan pengujian parsial diketahui jika variabel sektor unggulan (X1) menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,206059 dengan nilai probabiliti sebesar 0.8370. Berdasarkan nilai probabiliti yakni 0,8370 menunjukkan jika lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05 hal ini menandakan jika sektor unggulan (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga pekerja.

b. Upah Minimum (X2)

Berdasarkan perolehan pengujian parsial diketahui jika variabel upah minimum (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,943340 dengan nilai probabiliti sebesar 0,0000. Berdasarkan nilai probabiliti yakni 0,0000 menunjukkan jika lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05 hal ini menandakan jika upah minimum (X2) berpengaruh secara signifikan atas penyerapan tenaga pekerja.

8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan (uji F) dipergunakan untuk mencari tahu pengaruh secara sama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan perolehan pengujian simultan diketahui jika F hitung senilai 1849.594 dengan hasil probabiliti sebesar 0.000000. Berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,05 maka nilai probabiliti 0.000000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut memperlihatkan jika secara bersama-sama variabel independen yakni sektor unggulan dan upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja selaku variabel dependen.

9. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Uji koefisien determinasi R² digunakan untuk mencari tahu seberapa besar kekuatan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Perolehan pengujian koefisien determinasi R^2 yang telah didapati hasil koefisien determinasi sebesar 0.997430. Hal ini memperlihatkan jika variabel sektor unggulan serta upah minimum memiliki kekuatan dalam penyerapan tenaga pekerja sebesar 99,74%, sementara itu sebanyak 0,26% penyerapan tenaga pekerja dipengaruhi dari variabel diluar penelitian.

10. Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Analisa elastisitas penyerapan tenaga pekerja pada penelitian dipergunakan untuk mencari tahu seberapa besar tingkat keterserapan tenaga pekerja pada tiap-tiap sektor unggulan. Hasil analisis penyerapan tenaga pekerja yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Hasil Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021**

Sektor Unggulan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata	Ke
Industri pengolahan	2,08	0,49	0,39	3,90	1,12	1,60	Elastis
Pengadaan air	40,22	3,61	- 1,62	0,62	22,03	12,97	Elastis
Perdagangan	2,53	0,13	0,38	- 0,43	0,40	0,60	Inelastis
Penyediaan Akomodasi Mamin	0,77	2,22	1,56	- 0,61	1,80	1,15	Elastis
Informasi Komunikasi	5,95	0,84	- 1,20	2,28	-0,93	1,39	Elastis

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Berdasarkan analisis elastisitas penyerapan pekerja dari kelima sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur diketahui terdapat empat sektor unggulan yang menunjukkan hasil penyerapan tenaga kerja elastis lebih dari 1 yakni sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air dan pengelolaan limbah, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum serta sektor informasi komunikasi. Sementara itu, untuk sektor unggulan yang memperlihatkan hasil penyerapan tenaga kerja inelastis yakni sektor perdagangan besar dan eceran dengan hasil sebesar 0,60.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Keterserapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Pengaruh sektor unggulan terhadap ketersediaan tenaga kerja bisa dilihat dari uji parsial (Uji T). Hasil pengujian memperlihatkan sektor unggulan mempunyai pengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap ketersediaan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 yang berarti hal ini menolak H_1 dan menerima H_0 . Adanya pengaruh negatif menandakan jika didapati hubungan berlawanan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ketika sektor unggulan mengalami peningkatan laju pertumbuhan maka akan menurunkan tingkat ketersediaan tenaga kerja, begitupun sebaliknya. Ketika sektor unggulan mengalami penurunan laju pertumbuhan maka akan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja. Pada perolehan pengujian diketahui

peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan keterserapan tenaga kerja sebanyak 0,206059.

Perolehan penelitian ini tidak selaras dengan teori yang diutarakan oleh Agus Yulistiyono yang mengemukakan laju pertumbuhan yang disumbang dari sektor unggulan pada suatu wilayah akan diikuti dengan pertumbuhan pekerja terserap dan banyaknya lapangan pekerjaan (Yulistiyono *et al.*, 2021). Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor unggulan akan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi, disisi lain dari bergeraknya kegiatan perekonomian akan diikuti dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Perolehan pengujian juga tidak selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Hadi Sumarsono yakni ketika suatu wilayah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong dari sektor unggulan akan diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja. Adanya peningkatan permintaan tenaga kerja ini akan meningkatkan keterserapan pekerja dalam kegiatan ekonomi (Sumarsono *et al.*, 2017)

Pada penelitian diketahui bahwa sektor unggulan yang ada di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 yakni sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, sektor perdagangan, sektor akomodasi makan minum serta sektor informasi komunikasi. Kelima sektor unggulan Provinsi Jawa Timur termasuk pada klasifikasi sektor industri manufaktur serta sektor jasa dengan penggunaan teknologi modern seperti mesin pada kegiatan ekonominya.

Data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2017 hingga tahun 2021 memperlihatkan laju pertumbuhan yang stabil diangka 5%. Sementara itu, jika melihat laju pertumbuhan ekonomi dari kelima sektor unggulan memiliki nilai diatas laju pertumbuhan ekonomi provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2017 hingga tahun 2019 yakni pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7%, disisi lain sektor yang mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 yakni sektor pengadaan air dan pengelolaan limbah sebesar 4%. Di tahun 2020 tiga sektor unggulan mengalami penurunan laju pertumbuhan yakni sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -8%, sektor perdagangan sebesar -5% serta sektor industri pengolahan sebesar -2%. Untuk sektor informasi komunikasi serta sektor pengadaan air memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 9% dan 5%.

Jika melihat antara laju pertumbuhan tenaga kerja pada tiap-tiap sektor unggulan selama tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan penurunan dari laju penyerapan tenaga kerja pada Povinsi Jawa Timur. Pada sektor industri pengolahan laju pertumbuhan pekerja dari tahun 2017 hingga tahun 2021 tumbuh pada angka 3,5% dengan penurunan terjadi pada tahun 2020 menjadi 2%. Untuk sektor pengadaan air terjadi pertumbuhan tinggi pada tahun 2017 mencapai 25%, tahun 2018 turun menjadi 15% dn terjadi pertumbuhan negatif sebesar -7% pada tahun 2019. Pada sektor perdagangan terjadi laju pertumbuhan tenaga kerja yang fluktuatif dengan laju pertumbuhan tenaga kerja tertinggi pada tahun

2017 sebesar 15%, pada 2018 mengalami penurunan pertumbuhan tenaga kerja terserap menjadi 0,8%, lalu pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami laju pertumbuhan yakni berturut-turut sebesar 2,28%, 2,50% di tahun 2020 dan tahun 2021 naik menjadi 3,16%.

Untuk sektor penyediaan akomodasi makan dan minum pada tahun 2017 tenaga kerja terserap tumbuh sebesar 6%, kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 16% yang merupakan laju pertumbuhan tenaga kerja tertinggi sektor penyediaan akomodasi, lalu tahun 2019 sebesar 11%, kemudian tahun 2020 mengalami penurunan walaupun masih tumbuh positif sebesar 5,41%, serta pada tahun 2021 mengalami laju pertumbuhan tenaga kerja sebesar 5,50%. Sektor terakhir yakni sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2017 sebesar 41%, lalu pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan pertumbuhan pekerja terserap berturut-turut menjadi 5,70% dan 2019 tumbuh di -8,82%. Lalu mengalami kenaikan pertumbuhan pekerja terserap di tahun 2020 sebesar 22% dan di tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan yang menurun yakni -2,87%.

Perolehan penelitian selaras dengan penelitian dari Anggraini Hustia yakni sektor unggulan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan pekerja di kabupaten Batang Hari. Hal tersebut diakibatkan karena sumbangan dari sektor unggulan yakni sektor perdagangan dan sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Batang Hari tidak terlalu tinggi, disisi lain kabupaten Batang Hari dalam

perekonomian wilayahnya masih mengadalkan sektor pertanian. Hal ini menjadikan sektor unggulan tidak terlalu berpengaruh terhadap keterserapan tenaga kerja di kabupaten Batang Hari (Anggraini, 2018). Perolehan pengujian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Kurniawan jika pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari sektor basis di kota Makassar tidak berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Banyaknya total angkatan kerja daripada jumlah kesempatan kerja yang disediakan oleh lapangan usaha sektor basis menjadikan angkatan kerja tidak banyak yang terserap pada lapangan pekerjaan (Kurniawan & Bado, 2017).

Perolehan penelitian juga selaras dengan penelitian dari Nofandilah yang menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi dari tiap-tiap sektor di kawasan gerbangkertasusila tidak berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap keterserapan pekerja (Nofandilah & Soelistyo, 2018). Kawasan gerbangkertasusila dikenal dengan kawasan perekonomian yang padat modal dengan sektor unggulan yang mendominasi ialah sektor industri dengan penggunaan teknologi pada proses produksinya.

Kelima sektor unggulan Provinsi Jawa Timur yang termasuk pada sektor industri dan jasa mengharuskan para pelaku usahanya untuk berorientasi pada padat modal dari pada padat karya dengan lebih banyak menggunakan teknologi modern, selain itu pada penggunaan tenaga pekerja lebih banyak menggunakan tenaga pekerja profesional dengan

keahlian khusus yang mampu mengoperasikan mesin-mesin produksi secara maksimal dari pada penggunaan tenaga pekerja non-profesional. Hal ini menjadikan sektor unggulan tidak maksimal dalam menyerap tenaga pekerja di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, jika melihat data publikasi BPS dapat dilihat sektor ekonomi yang hingga tahun 2021 mampu menyerap tenaga kerja paling banyak setiap tahunnya ialah sektor pertanian sebanyak 31% atau sekitar 6 juta tenaga pekerja.

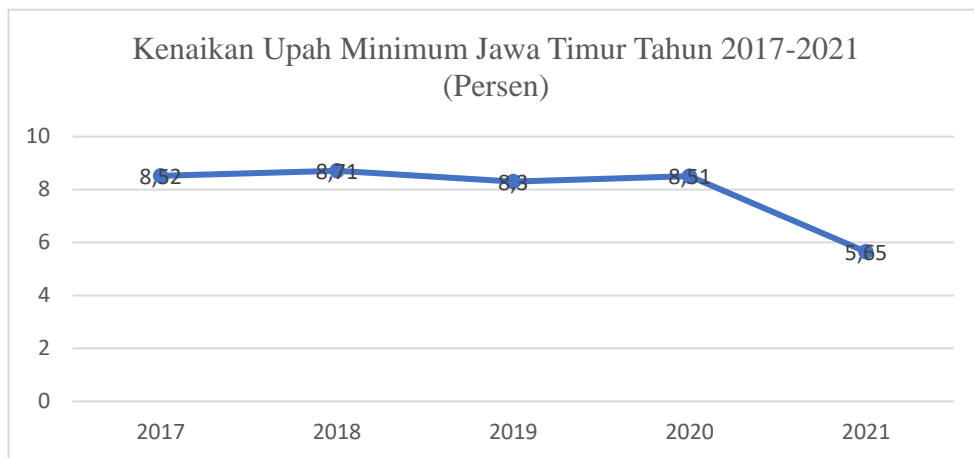
Hubungan negatif serta tidak signifikan dari sektor unggulan terhadap keterserapan pekerja dapat terjadi karena keterserapan pekerja di Provinsi Jawa Timur tidak hanya terjadi pada sektor unggulan namun juga terjadi keterserapan di sektor-sektor ekonomi lainnya. Terdapat beberapa faktor diantaranya yakni laju pertumbuhan penduduk dan struktur umur penduduk. Laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah akan mempengaruhi total penduduk yang dimiliki. Total penduduk akan mempengaruhi total angkatan kerja yang kemudian bisa mempengaruhi kesempatan kerja yang tersedia. Ketika angkatan kerja bertambah maka total kesempatan kerja yang tersedia akan semakin sedikit. Struktur umur penduduk juga turut mempengaruhi keterserapan tenaga kerja suatu wilayah. Di mana jumlah umur penduduk produktif dengan rentang usia antara 15-64 tahun meningkat maka kesempatan kerja yang ada akan menurun yang diakibatkan dari timbulnya persaingan antar pencari kerja (Argus & Kuntoro, 2017).

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Keterserapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Pengaruh upah minimum terhadap keterserapan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui uji parsial (Uji T). Berdasarkan uji T memperlihatkan pengaruh yang positif serta signifikan dari adanya upah minimum terhadap penyerapan pekerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 yang berarti menerima H_1 dan menolak H_0 . Adanya pengaruh positif menandakan hubungan searah dimana ketika terdapat peningkatan upah minimum sebesar 1% bisa meningkatkan keterserapan pekerja sebanyak 6,94% pekerja. Dan sebaliknya juga begitu, ketika upah minimum mengalami penurunan sebesar 1% maka bisa diikuti pula dengan menurunnya pekerja terserap sebanyak 6,94%.

Jika melihat penetapan upah minimum yang diberlakukan di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya selalu meningkat. Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebagai berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Gambar 4.2 Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (Persen)

Dari gambar 4.2 diketahui kenaikan upah minimum tahun 2017 sebesar 8,52%. Selanjutnya tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,71% sebesar Rp. 120.000. Tahun 2019 naik sebesar 8,30% sebesar Rp. 121.000. Pada tahun 2020 upah minimum mengalami kenaikan sebesar 8,51% atau sebesar Rp. 138.000. Serta tahun 2021 upah minimum mengalami peningkatan sebesar 5,65% dari tahun 2020 atau sebesar Rp. 100.000.

Perolehan pengujian tidak sesuai dengan pendapat dari Simanjuntak yang menjelaskan jika upah minimum yang ditetapkan terus meningkat maka akan mempengaruhi keterserapan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah maka akan meningkatkan pula biaya produksi yang berakibat dengan pengusaha untuk menerapkan efisiensi dengan mengurangi total pekerja yang dipekerjakan (Simanjuntak, 1998). Hasil

penelitian Maulidina menjelaskan jika upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap keterserapan tenaga kerja berpendidikan rendah di Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat terjadi karena peningkatan upah minimum justru akan membebani perusahaan sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk berorientasi pada industri padat modal serta lebih memilih memindahkan perusahaannya ke daerah lain yang menetapkan upah lebih rendah (Maulidina, 2018). Peningkatan upah minimum yang dilakukan secara terus menerus akan mengurangi penggunaan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak dengan peningkatan pengangguran.

Jika dihubungkan dengan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang maka kenaikan upah minimum akan ditanggapi oleh pengusaha dengan beralih ke industri padat modal yang berorientasi pada penggunaan teknologi seperti permesinan. Selanjutnya, guna membantu mengoperasikan mesin produksi dan meningkatkan hasil produksi tersebut pengusaha akan mempekerjakan tenaga kerja terdidik dengan keahlian khusus dan tingkat pendidikan tinggi.

Perolehan pengujian sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Felber Lube yang menyatakan jika upah minimum berpengaruh signifikan atas keterserapan pekerja di kota Bitung. Peningkatan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah akan meningkatkan permintaan tenaga pekerja pada hal ini adalah tenaga kerja terdidik (*Lube et al.*, 2021). Pengujian juga selaras dengan pengujian yang dilakukan oleh Rasyid yang menjelaskan jika kenaikan upah minimum di Kabupaten Bogor

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Rasyid & Indah, 2022).

Peningkatan upah minimum bisa memengaruhi daya beli masyarakat yang berakibat pada peningkatan permintaan yang terus meningkat, dari peningkatan permintaan tersebut akan direspon oleh pelaku usaha dengan menambah tenaga pekerja yang dibutuhkan pada kegiatan produksi. Disisi lain, peningkatan tingkat upah akan direspon oleh pelaku usaha untuk bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerjanya (Kuncoro, 2002).

Peningkatan upah minimum akan memungkinkan tenaga kerja guna meningkatkan nutrisinya beserta keluarganya. Selain itu, dari adanya peningkatan upah minimum tenaga kerja akan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga dalam jangka panjang kedua hal tersebut bisa berdampak pada peningkatan kinerja serta produktivitas serta bisa mampu menyerap tenaga kerja berkualitas.

3. Tingkat Ketersepan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Pada pengujian untuk melihat seberapa besar kemampuan sektor unggulan mampu menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 dilakukan dengan analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja. Selaras dengan hasil pengujian sektor unggulan terhadap ketersediaan tenaga kerja, hasil analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja Provinsi

Jawa Timur tahun 2017-2021 pada sektor unggulan memperlihatkan fluktuasi. Hasil elastisitas penyerapan pekerja sektor unggulan Provinsi Jawa Timur bisa dilihat pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.10 Hasil Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata	Ket
Industri pengolahan	2,08	0,49	0,39	3,90	1,12	1,60	Elastis
Pengadaan air	40,22	3,61	-1,62	0,62	22,03	12,97	Elastis
Perdagangan	2,53	0,13	0,38	-0,43	0,40	0,60	Inelastis
Penyediaan Akomodasi Mamin	0,77	2,22	1,56	-0,61	1,80	1,15	Elastis
Informasi Komunikasi	5,95	0,84	-1,20	2,28	-0,93	1,39	Elastis

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.10 diketahui hasil elastisitas penyerapan tenaga kerja cenderung mengalami penerununan walaupun masih bersifat positif. Hasil elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor unggulan dengan hasil rata-rata elastisitas tinggi ialah sektor unggulan yakni sebesar 12,97 diikuti dengan sektor industri pengolahan sebesar 1,60. Selanjutnya ialah sektor informasi komunikasi sebesar 1,39 serta diikuti dengan sektor penyediaan akomodasi makan-minum sebesar 1,15. Sementara itu, untuk hasil elastisitas tenaga kerja dengan hasil inelastis berada pada sektor perdagangan sebesar 0,60.

Sektor pengadaan air memperlihatkan nilai elastisitas paling tinggi sebesar 40,22 menandakan jika pertumbuhan ekonomi yang disumbang

dari sektor pengadaan air meningkat sebesar 1% maka bisa meningkatkan keterserapan pekerja sebesar 12,97%. Untuk sektor industri pengolahan hasil elastisitas menunjukkan nilai 1,60 yang menandakan apabila sektor industri pengolahan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka bisa meningkatkan keterserapan tenaga kerja sebesar 1,60%. Pada sektor informasi dan komunikasi menunjukkan hasil elastisitas penyerapan tenaga pekerja sebesar 1,39 yang menandakan jika sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka bisa meningkatkan keterserapan tenaga pekerja sebesar 1,39%.

Sementara itu, untuk sektor penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan hasil elastisitas penyerapan tenaga pekerja sebesar 1,15 yang berarti ketika sektor pengadaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka bisa meningkatkan keterserapan pekerja sebesar 1,15%. Sementara itu, pada sektor perdagangan menghasilkan analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja sebesar 0,60 yang menandakan inelastis. Hasil inelastis pada sektor perdagangan menandakan jika sektor unggulan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka keterserapan pekerja hanya sebesar 0,60%.

Jika melihat dari elastisitas penyerapan tenaga kerja didapati jika sektor perdagangan memiliki nilai inelastis keterserapan pekerja hanya sebesar 0,60% dan selama lima tahun dari tahun 2017-2021 belum secara

maksimal dalam menyerap tenaga kerja. Rendahnya keterserapan tenaga kerja di sektor perdagangan Provinsi Jawa Timur selama lima tahun salah satunya diakibatkan dari keterlambatan dan penurunan aktivitas perdagangan baik perdagangan lokal maupun perdagangan internasional (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022).

Akan tetapi, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan sebesar 1,44% dan mampu memberikan nilai tambah pada pertumbuhan PDRB. Sementara itu, jika melihat nilai dari sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum serta sektor informasi menunjukkan elastisitas keterserapan pekerja lebih dari 1%. Akan tetapi dari nilai laju pertumbuhan produktivitas untuk sektor industri pengolahan selama lima tahun dari 2017-2021 sebesar 1,10%. Untuk laju pertumbuhan produktivitas sektor pengadaan air dan penyediaan akomodasi makan minum sebesar 0,21% dan 0,34%. Sementara untuk laju pertumbuhan produktivitas sektor informasi yakni -0,29%.

Idealnya dari nilai elastisitas keterserapan tenaga kerja yang memperlihatkan nilai diatas 1% seharusnya mampu diikuti dengan pertumbuhan produktivitas yang juga meningkat. Akan tetapi, dari perolehan pengujian didapati hubungan yang terbalik yakni tingginya nilai keterserapan tenaga kerja malah menurunkan tingkat produktivitas pekerja sendiri. Perolehan hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Lestari yakni produktivitas pekerja akan berbeda

yang digambarkan dari elastisitas keterserapan yang juga berbeda (Lestari & Marhaeni, 2017). Pada sektor yang mudah mempekerjakan tambahan pekerja seperti di sektor pertanian (primer) akan menunjukkan elastisitas kesempatan kerja yang tinggi sementara untuk sektor yang termasuk pada kelompok sektor industri manufaktur (sekunder) dan sektor jasa (sekunder) cenderung inelastis serta selalu mengalami fluktuasi hal ini salah satunya disebabkan karena kedua sektor tersebut lebih berorientasi pada tenaga kerja dengan keahlian tertentu serta memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tingginya elastisitas kesempatan kerja tersebut akan menjadikan produktivitas pekerja turun, sebab produktivitas yang diberikan oleh pekerja akan dibagi dengan pekerja yang lainnya. Sehingga nantinya para pekerja akan menerima rata-rata penghasilan yang cenderung lebih rendah (Lestari & Marhaeni, 2017). Hal ini sejalan dengan teori permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek jika pelaku usaha bersedia untuk mempekerjakan pekerja tambahan jika upah yang diberikan jauh lebih rendah dari upah pekerja sebelumnya. Akan tetapi, pada jangka pendek penambahan pekerja tersebut hanya akan menghasilkan tambahan output produksi yang sedikit. Selain itu, karena upah yang diberikan sedikit maka produktivitas yang diberikan oleh pekerja untuk pelaku usaha juga berkurang (Sukarniati, 2019).

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perolehan penelitian yang sudah dilaksanakan dengan judul “Pengaruh Sektor Unggulan dan Upah Minimum terhadap Keterserapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021” dapat ditarik kesimpulan yakni :

1. Sektor unggulan mempunyai pengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 dengan hasil probabiliti sebesar 0,8370 serta hasil T hitung sebesar - 0,206059. Sementara itu, variabel upah minimum memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keterserapan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 dengan hasil probabiliti 0,0000 dan hasil T hitung sebesar 6,943340.
2. Tingkat keterserapan tenaga kerja yang memiliki nilai elastisitas yakni di sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, sektor penyediaan akomodasi makan-minum serta sektor informasi dengan tingkat elastisitas keterserapan tenaga kerja tertinggi ialah di sektor pengadaan air. Sementara itu, untuk sektor perdagangan mempunyai nilai inelastis bagi keterserapan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka saran yang bisa diberikan ialah :

1. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan untuk terus meningkatkan sektor-sektor unggulan yang ada baik melalui peningkatan investasi ataupun pemberian intensif pendanaan agar sektor unggulan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan mampu mendorong sektor ekonomi lainnya sehingga bisa menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur secara maksimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya jika ingin meneliti dengan tema yang serupa diharapkan untuk menambahkan beberapa variabel bebas yang lebih beragam terkait faktor-faktor yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga bisa diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. (2019). *Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2014-2018*.
- Adisasmita, R. (2018). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah* (Kedua). Expert.
- Agus Yulistiyono, Endra Gunawan, Tri Widayati, Hamdan Firmansyah, Natalia Artha Malau, Tekni Megaster, Adi Ekopriyono, Teguh Pamuji Tri Nurhayati, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Suharno Suharno, Susilo Setiyawan, Nugroho Sumarjiyanto, Sardjana Orba Manul, N. I. (2021). *Buku di Google Play Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi* (B. P. N. Malau (ed.); Pertama). Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati.
- Ajija, S. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Pertama). Salemba Empat.
- Amalia, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Pert). Graha Ilmu.
- Anggraini Yusniah. (2018). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. In *Indocamp*.
- Anggraini, H. (2017). Sektor Basis Kabupaten Batang Hari Dan Implikasinya. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 1642.
- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, & Arfilindo, H. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika* (Pertama). Deepublish Publisher.
- Apipah, R. (2018). *Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Banten* [UIN Sultan Maulana Hasanuddin anten]. <http://repository.uinbanten.ac.id/2696/>
- Arfida. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Argus, B., & Kuntoro. (2017). Analisis Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 6(2), 114.
- Aryanti, H. G., Setiadi, I. O., Hastyorini, I. R., & Sari, K. (2019). *Ketenagakerjaan* (A. Feryanto (ed.)). Cempaka Putih.
- Assidikiyah, N., Marseto, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Sebelum Dan Saat Terjadi

- Pandemi Covid-19). *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 102–115.
<https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11017>
- Astuti, A. M. (2010). Fixed Effect Model Pada Regresi Data Panel. *Beta*, 3(2), 134–145. <https://jurnalbeta.ac.id/index.php/betaJTM/article/view/91/61>
- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum kerja : hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*. RajaGrafindo Persada.
- Azis, M., & Ahsan, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Kedua)*. CV. Nur Lina.
- Citamaha, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Besar dan Sedang Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 (Studi Kasus: Industri Makanan Pada 38 Kabupaten/Kota)*. Brawijaya.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, disnakertrans.jatimprov.go.id 1 (2021).
<https://disnakertrans.jatimprov.go.id/official/2021/12/01/keputusan-gubernur-jawa-timur-nomor-188-803-kpts-013-2021-tentang-upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur-tahun-2022/>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), hal. 10.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- Frisdiantara, C., & Mukhlis, I. (2018). *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris (Pertama)*. Deepublish Publisher.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5th ed.). Salemba Empat.
- Hajeri, H., Yurisinthae, E., & Dolorosa, E. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2), 253. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12485>
- Hidayat, K. A. (2019). *Analisis Pengaruh Investasi, Jumlah Industri, Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur*. 11.

- Ibrahim, A. P., Iriani, R., & Wijaya, R. S. (2022). POTRET SEKTOR UNGGULAN DAN NON UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 4(2), 118–126.
- Irawan, & Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Pembangunan* (Keenam). BPFE-Yogyakarta.
- Ismaya, S. (2018). *Hukum Ketenagakerjaan* (Pertama). Suluh Media.
- Istiqomah, A. (2019). Analisis Pengaruh Sektor Basis dan NonBasis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2017. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kamal, M. (2020). Kebutuhan Akan SDM Suatu Doktrin Ekonomi (Konsep SDM, Identifikasi Nilai SDM, Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja dan Karakteristik Tenaga Terdidik. *Jurnal Cendekia*, 1(1), 1–12.
- Khasanah, N. (2020). *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kuncoro, H. (2002). Penerapan Upah Sistem Bagi Hasil Dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, 7(1), 45–46. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i1.356>
- Kurniawan, A. W., & Bado, B. (2017). Potensi Sektorl Dan Dampaknya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Makassar. *Jurnal Economix*, 5(1), 250–258.
- Kurniawan, B. (2014). *Perekonomian Indonesia* (Pertama). Al Fath Zumar.
- Lahama, A. . ., Rengkung, L. R., & Ruauw, E. . . (2018). Analisis Sektor Unggulan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosioekonomi*, 14(2), 205. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.2.2018.20584>
- Laily, N., & Pristyadi, B. (2013). *Teori Ekonomi* (Pertama). Graha Ilmu.
- Lapong, P. R., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Peranan

- Sektor Basis Dan Non Basis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus Empat Kota Di Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8), 92–105.
<https://doi.org/10.35794/jpekd.23432.19.8.2018>
- Lestari, N. W. Y., & Marhaeni, A. A. I. N. (2017). Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1513–1539.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/24582>
- Lube, F., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 25–36.
- Maharani, N. R. P. (2020). *Analisis Sektor Unggulan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Maulidina, M. A. (2018). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*, 1–14.
- McEachern, W. A. (2001). *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer* (S. Rosyidi (ed.); Pertama). Salemba Empat.
- Musafak, M. A. (2019). *Analisis Pengaruh Sektor Industri dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tuban Tahun 2013-2017* [UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/34148/3/Moch. Ali Musafak_G71215020.pdf
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan : Pendekatan Populer dan Praktis* (Pertama). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nasir, A., & Jamal, A. (2019). *Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi : Analisis Pascapelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia* (Pertama). Graha Ilmu.
- Nofandilah Arumsyah Putri dan Soelistyo, A. (2018). Analisis Pengaruh Upah,Pdrb,Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dikawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 357–371.
- Nurmilah, R. (2021). *Ekonomi Kreatif: Sub Sektor Kuliner Kota Sukabumi*

- (Pertama). Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Parkin, M. (2017). *Ekonomi Mikro* (D. A. Halim (ed.); Sebelas). Salemba Empat.
- Pramusinto, N. D., & Daerobi, A. (2020). Labor Absorption of the Manufacturing Industry Sector in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 3(1), 303–310. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.769>
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 220. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i02.p05>
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, Purnama, D., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., Rozaini, N., Tanjung, R., & Nugraha, N. A. (2021). Ekonomi Pembangunan. In R. Watrionthos (Ed.), *Https://Medium.Com/* (Pertama). Yayasan Kita Menulis. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Rahmadani, F. (2022). *Analisis Pengaruh PDRB Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2020*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rasyid, H. Al, & K, A. T. I. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bogor Dari Tahun 2010 - 2020. *Owner*, 6(4), 4167–4174. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1157>
- Santoso, R. P. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Pertama). UPP STIM YKPN.
- Sayuti, M., & Safitri, W. R. (2020). Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2018. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 1–15.
- Setyaningrum, P. (2022). *Daftar UMP dan UMK Jatim 2023, Berlaku Mulai 1 Januari 2023*. Kompas. <https://doi.org/https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/08/064200378/daftar>

ar-ump-dan-umk-jatim-2023-berlaku-mulai-1-januari-2023

- Sholeh, M. (2012). Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa Potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(1), 62–75. <https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.618>
- Simanjuntak, P. J. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Kedua). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sofyan, M. (2021). *Pengembangan Sektor Unggulan Pendukung Perluasan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah* (Pertama). CV Odis.
- Sugiyono. (2014). *Metode Peneliiian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sukarniati, L. (2019). *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Pertama). Deepublish Publisher.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Kedua). PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan* (Kedua). Kencana.
- Sukirno, S. (2016). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Ketiga). RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, H., Nasikh, & Muslikah, S. (2017). *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah* (Pertama). Gunung Samudera.
- Susanti, M. N. I. (2010). *Statistik Deskriptif dan Induktif* (Pertama). Graha Ilmu.
- Taufiqurrachman, F. (2022). Analisis Potensi Sektoral Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Manajaemen Dan Sosial*, 5(2), 69–73. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS/article/view/318>
- Triartmawati, A., Juliprijanto, W., & Destiningsih, R. (2019). PDRB BASIS DAN NONBASIS TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019. *Directory Journal of Economic*, 2.
- Wenagama, I. W. (2015). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR BASIS DI PROVINSI BALI* Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia *PENDAHULUAN* Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembang. 3, 445–471.

Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 687–698.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A